



Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Independensi Integritas Profesionalisme







**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pemeriksa Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2021

Direktur Utama,



I Nyoman Wara

NIP. 196708091988031004

*J*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



- 1 Achsanul Qosasi - Anggota
- 2 Pius Lustrilanang - Anggota
- 3 Harry Azhar Azis - Anggota
- 4 Isma Yatun - Anggota





Foto: Dokumentasi Biro Humas & KSI BPK

5

6

7

8

9

- 5 Agung Firman Sampurna - Ketua
- 6 Agus Joko Pramono - Wakil Ketua
- 7 Hendra Susanto - Anggota
- 8 Daniel Lumban Tobing - Anggota
- 9 Bahrullah Akbar - Anggota



# Kata Pengantar



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan laporan kinerja yang pertama dalam periode Renstra BPK 2020-2024. Dimulainya Rencana Strategis (Renstra) baru pada Tahun 2020 merupakan upaya BPK untuk menyelaraskan Renstra BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keselarasan tersebut diharapkan akan memudahkan BPK dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan, pengembangan tata kelola organisasi, pengembangan kerangka regulasi dan kelembagaan, perumusan target kinerja dan ukuran pencapaiannya, serta penyusunan kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan.

Penerbitan Laporan Kinerja BPK adalah wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan Kinerja merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja BPK kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan demikian, harapan para pemangku kepentingan akan suatu lembaga *Supreme Audit Institution* yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPK Tahun 2020 menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK atas 47 indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan untuk menyesuaikan dengan Renstra BPK 2020-2024 maka pada Tahun 2020 BPK memperkenalkan beberapa IKU/IK baru agar lebih selaras dengan dinamika organisasi saat ini.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan karena dunia memasuki era VUCA, Industri 4.0, dan pada saat yang sama menghadapi penyebaran pandemi Covid-19. Berbagai upaya telah BPK lakukan untuk mempertahankan kinerja di tengah pandemi Covid-19. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan memperkenalkan Aplikasi Kelola Tugas untuk mengelola dan memonitor penugasan yang dilakukan pelaksana BPK, aplikasi Ruang BPK untuk rapat daring, Juknis Pemeriksaan Keuangan dalam Masa Darurat, menerapkan *remote audit*, dan lain-lain.

# Kata Pengantar

Upaya perubahan yang dilakukan BPK secara cepat untuk mengadaptasi kebiasaan baru dalam menjalankan tugasnya selama masa Pandemi Covid-19 membuahkan hasil nyata. Meski dalam situasi penuh keterbatasan, Nilai Kinerja BPK Tahun 2020 meningkat dibandingkan Nilai Kinerja Tahun 2019 yaitu mencapai angka 98,66 dari sebelumnya di angka 96,02. Capaian tersebut adalah hasil upaya bersama karena dalam situasi pandemi yang membutuhkan banyak adaptasi kebiasaan baru, dibutuhkan sinergi dan komitmen semua satuan kerja secara optimal untuk mencapai tujuan kelembagaan. Oleh karena itu, kami mengapresiasi segenap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang telah mendukung tugas dan fungsi BPK.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPK di masa yang akan datang.

Jakarta, 26 Februari 2021



Ditandatangani secara elektronik  
Bahtiar Arif

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	XI
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	XIII
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Tentang BPK .....	3
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>20</b>
A. Perencanaan Strategis.....	20
B. Perencanaan Kinerja Tahunan .....	33
C. Risiko yang Mempengaruhi Sasaran Strategis/Strategi .....	36
D. Evaluasi Perencanaan Strategis .....	37
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>42</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	43
Sasaran Strategis – Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi.....	43
IKU 1 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK .....	45
IKU 2 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan .....	48
IKU 3 – Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi.....	50



# Daftar Isi

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis.....	52
Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif .....	63
Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara.....	80
Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.....	87
Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara .....	95
Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.....	103
Indikator Kinerja Generik.....	111
B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	124
C. Kinerja dan Capaian Lainnya .....	128
D. Tantangan Masa Depan.....	130
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>134</b>

# Daftar Tabel

Tabel 1 - Profil SDM BPK menurut Jabatan Fungsional .....	17
Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 3 - Indikator Kinerja BPK Tahun 2020.....	43
Tabel 4 - Perkembangan Capaian IKU 1 Periode Tahun 2018-2020 .....	47
Tabel 5 - Perbandingan Realisasi IKU 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020– 2024.....	48
Tabel 6 - Perkembangan Capaian IKU 2 Periode Tahun 2018-2020.....	49
Tabel 7 - Perbandingan Realisasi IKU 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020– 2024.....	50
Tabel 8 - Perkembangan Capaian IKU 3 Periode 2018-2020 .....	51
Tabel 9 - Perbandingan Realisasi IKU 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020– 2024.....	51
Tabel 10 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 1 Tahun 2018-2020.....	53
Tabel 11 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	53
Tabel 12 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 1 Tahun 2018-2020.....	54
Tabel 13 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	54
Tabel 14 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 1 Tahun 2018-2020.....	55
Tabel 15 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	55
Tabel 16 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 1 Tahun 2018-2020.....	56
Tabel 17 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	56
Tabel 18 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 1 Tahun 2018-2020.....	57
Tabel 19 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	57
Tabel 20 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 1 Tahun 2018-2020 .....	58
Tabel 21 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	58
Tabel 22 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 1 Tahun 2018-2020 .....	59
Tabel 23 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	59
Tabel 24 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 1 Tahun 2018-2020 .....	60

# Daftar Tabel

Tabel 25 - Perbandingan Realisasi IKU 8 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	60
Tabel 26 - Perkembangan Capaian IKU 9 Strategi 1 Tahun 2018-2020 .....	61
Tabel 27 - Perbandingan Realisasi IKU 9 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	61
Tabel 28 - Perkembangan Capaian IKU 10 Strategi 1 Tahun 2018-2020 .....	62
Tabel 29 - Perbandingan Realisasi IKU 10 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	62
Tabel 30 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 pada Lingkup AKN Tahun 2018-2020.....	65
Tabel 31 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 pada Lingkup AKN terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 .....	65
Tabel 32 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 pada Lingkup AKN Tahun 2018-2020 .....	66
Tabel 33 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 2 pada Lingkup AKN terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 .....	66
Tabel 34 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 pada Lingkup AKN Tahun 2018-2020 .....	67
Tabel 35 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 pada Lingkup AKN terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 .....	67
Tabel 36 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 2 pada Lingkup AKN Tahun 2018-2020 .....	68
Tabel 37 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 2 pada Lingkup AKN terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 .....	68
Tabel 38 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 AUI Tahun 2018-2020.....	69
Tabel 39 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 AUI terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	69
Tabel 40 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 AUI Tahun 2018-2020.....	70
Tabel 41 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 AUI terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	70
Tabel 42 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 AUI Tahun 2018-2020.....	71
Tabel 43 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 2 AUI terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	71
Tabel 44 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020 .....	72
Tabel 45 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	73
Tabel 46 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020.....	73

# Daftar Tabel

Tabel 47 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	74
Tabel 48 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020.....	75
Tabel 49 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	76
Tabel 50 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020.....	76
Tabel 51 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	77
Tabel 52 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020.....	78
Tabel 53 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	79
Tabel 54 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 3 Tahun 2018-2020 .....	81
Tabel 55 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	81
Tabel 56 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 3 Tahun 2018-2020 .....	82
Tabel 57 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	82
Tabel 58 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 3 Tahun 2018-2020 .....	83
Tabel 59 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	83
Tabel 60 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 3 Tahun 2018-2020 .....	84
Tabel 61 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	84
Tabel 62 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 3 Tahun 2018-2020 .....	85
Tabel 63 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	85
Tabel 64 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 3 Tahun 2018-2020 .....	86
Tabel 65 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	86
Tabel 66 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 4 Tahun 2018-2020.....	88
Tabel 67 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	88
Tabel 68 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 4 Tahun 2018-2020 .....	89

# Daftar Tabel

Tabel 69 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	89
Tabel 70 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 4 Tahun 2018-2020 .....	90
Tabel 71 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	90
Tabel 72 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 4 Tahun 2018-2020 .....	91
Tabel 73 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	91
Tabel 74 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 4 Tahun 2018-2020 .....	92
Tabel 75 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	92
Tabel 76 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 4 Tahun 2018-2020 .....	93
Tabel 77 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	93
Tabel 78 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 4 Tahun 2018-2020.....	94
Tabel 79 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	94
Tabel 80 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 5 Tahun 2018-2020 .....	97
Tabel 81 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	97
Tabel 82 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 5 Tahun 2018-2020 .....	98
Tabel 83 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	98
Tabel 84 - Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2020.....	99
Tabel 85 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 5 Tahun 2018-2020 .....	99
Tabel 86 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	99
Tabel 87 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 5 Tahun 2018-2020 .....	100
Tabel 88 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	101
Tabel 89 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 5 Tahun 2018-2020 .....	101
Tabel 90 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	102



# Daftar Tabel

Tabel 91 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 6 Tahun 2018-2020.....	104
Tabel 92 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	104
Tabel 93 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 6 Tahun 2018-2020 .....	105
Tabel 94 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	105
Tabel 95 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 6 Tahun 2018-2020 .....	106
Tabel 96 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	107
Tabel 97 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 6 Tahun 2018-2020 .....	107
Tabel 98 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	107
Tabel 99 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 6 Tahun 2018-2020 .....	108
Tabel 100 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	108
Tabel 101 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 6 Tahun 2018-2020 .....	109
Tabel 102 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	109
Tabel 103 - Perkembangan Capaian IKU Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2018-2020.....	111
Tabel 104 - Perbandingan Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	113
Tabel 105 - Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2018-2020.....	114
Tabel 106 - Perbandingan Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024.....	115
Tabel 107 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2018-2020 .....	116
Tabel 108 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 .....	117
Tabel 109 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2018-2020 .....	118
Tabel 110 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 .....	119
Tabel 111 - Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2018-2020 .....	120

# Daftar Tabel

Tabel 112 - Perbandingan Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 .....	121
Tabel 113 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2018-2020.....	122
Tabel 114 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 .....	123
Tabel 115 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran atas Sasaran Strategis/Strategi yang Didukung .....	124

# Daftar Gambar

Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960) .....	4
Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan.....	7
Gambar 3 - Model Kematangan Organisasi BPK.....	9
Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK .....	10
Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK .....	11
Gambar 6 - Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020-2024 .....	21
Gambar 7 - Visualisasi Renstra BPK 2020-2024 .....	24
Gambar 8 - <i>Focal Point</i> BPK 2020-2024 .....	27
Gambar 9 - Sinergi dan Kolaborasi antar Strategi Renstra BPK 2020-2024 .....	31
Gambar 10 - Kaskade Indikator Kinerja yang Menghubungkan Sasaran Strategis dan Strategi .....	32
Gambar 11 - Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2020.....	35
Gambar 12 - Siklus Pengukuran Kinerja.....	36
Gambar 13 - Dukungan Program Anggaran dalam Capaian Kinerja.....	126
Gambar 14 - Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Tahun 2020.....	127



# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja BPK Tahun 2020 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK dalam upaya pencapaian visi dan misi BPK yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Renstra BPK 2020-2024.

Dalam melaksanakan mandatnya BPK telah menetapkan visi dalam Renstra BPK 2020-2024 yaitu "Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara". Dalam upaya untuk mencapai visi tersebut BPK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itu BPK telah menetapkan tiga misi yaitu: (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Penyusunan Renstra BPK 2020-2024 di samping menyelaraskan periode dengan agenda pemerintah juga dituntut untuk selalu tanggap dan responsif atas isu-isu aktual. Karena itu, Renstra BPK 2020-2024 selain menyesuaikan dengan periode RPJMN juga telah merespons dampak bencana pandemi Covid-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Untuk mengukur kinerja level organisasi, Renstra BPK menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai pada Periode 2020-2024, yaitu meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka ditetapkan enam strategi dari aspek pemeriksaan maupun aspek kelembagaan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2020, telah ditetapkan tiga IKU BPK *Wide* yang merupakan komitmen Pimpinan BPK. Secara umum pencapaian kinerja BPK Tahun 2020 sudah baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk periode pengukuran Tahun 2020, terdapat satu IKU yang telah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2020 dan dua IKU masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

Skor Kinerja BPK *Wide* Tahun 2020 mencapai 98,66 atau lebih tinggi dari capaian sebelumnya di Tahun 2019 sebesar 96,02. Capaian skor kinerja tersebut merupakan realisasi dari tiga IKU yang telah ditetapkan targetnya dalam Rencana Aksi pencapaian target BPK Tahun 2020, yaitu IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK, IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan, dan IKU Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi.



# Ringkasan Eksekutif

Dari capaian-capaian yang belum dapat memenuhi target kinerja, BPK berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain sebagai berikut.

1. Optimalisasi penerapan SPKN, PMP, PMPP, Juklak dan Juknis Pemeriksaan serta Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif antara BPK dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian TLRHP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian TLRHP yang dilakukan pemerintah/entitas.
3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) sebagai sarana percepatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
4. Melaksanakan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD) yang terintegrasi, dan mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam proses pemeriksaan melalui percepatan penyusunan strategi komunikasi yang komprehensif baik dari sisi kelembagaan dan pemeriksaan (tim dan individu pemeriksa), dengan melakukan penyusunan strategi komunikasi yang efektif, menyusun *roadmap* kerja sama dengan pemangku kepentingan dan penyusunan *database* pemangku kepentingan berdasarkan tujuan organisasi, pemangku kepentingan prioritas, kebutuhan dan karakteristik pemangku kepentingan.
6. Melaksanakan review berkelanjutan atas implementasi strategi pemeriksaan agar selaras dengan program pemerintah.
7. Mengidentifikasi prosedur pemeriksaan alternatif sesuai dengan standar.

Selain itu, dalam rangka mencapai keenam strategi pada Renstra BPK yang diukur keberhasilannya melalui serangkaian indikator kinerja, upaya efisiensi yang dilakukan diantaranya sebagai berikut.

1. Strategi 1 "Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis": pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko menggunakan metode *self assessment* dan BPK melakukan rapat internal dan eksternal melalui *video conference*. Misalnya, BPK dan Australian National Audit Office (ANAO) melakukan *knowledge sharing* manajemen risiko melalui *video conference*. Hal tersebut berdampak pada penghematan anggaran.
2. Strategi 2 "Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif": seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK akan meningkatkan cakupan pemanfaatan *Big Data Analytics* (BDA) dan upaya peningkatan efektivitas pemantauan tindak

# Ringkasan Eksekutif

lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan negara.

3. Strategi 3 “Meningkatkan Efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara”: bekerja sama dengan Badan Diklat BPK terkait pelaksanaan diklat mandiri yang sesuai dengan kebutuhan pegawai dan dapat diikuti secara daring serta merevisi anggaran sehubungan dengan pandemi Covid-19 terutama yang berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas serta belanja bahan (jamuan rapat).
4. Strategi 4 “Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara”: mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam menghadapi pandemi Covid-19, di antaranya dengan mengalihkan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (*online*) melalui *e-learning* dan *Learning Management System* (LMS) serta mendorong pelaksanaan diklat secara mandiri oleh masing-masing satuan kerja yang telah disetujui oleh Badiklat PKN.
5. Strategi 5 “Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara”: melaksanakan konsultasi hukum secara *online* melalui Sistem Manajemen Hukum, keterjangkauan dan kemudahan layanan konsultasi hukum, baik secara *on site*, *on desk* dan/atau *web base*; melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya atas seluruh permintaan rekomendasi BPK dalam penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR; serta melaksanakan kegiatan inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
6. Strategi 6 “Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan”: melakukan standardisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK; melakukan pemetaan terkait kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan dalam setiap jabatan dan setiap satker dalam rangka mendukung penerapan sistem merit di BPK; melakukan pengembangan aplikasi yang dapat membantu pelaksanaan pekerjaan; melakukan pengembangan aplikasi secara mandiri (dhi. Biro TI) dengan melibatkan satuan kerja terkait; melakukan integrasi sistem, *database* dan jaringan teknologi informasi; mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam menghadapi pandemi Covid-19; meningkatkan kualitas pemantauan anggaran seluruh satker BPK melalui pelaksanaan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala); melakukan identifikasi kebutuhan diklat pada awal tahun dan melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan jam diklat pegawai per triwulan; serta melakukan identifikasi atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja dan menyusun rencana aksi penanganan risiko tersebut dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2020.

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, selama Tahun 2020 BPK juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain baik di level nasional maupun internasional. Beberapa capaian penting BPK antara lain sebagai berikut.

1. BPK melalui Wakil Ketua BPK terpilih sebagai *Board Member* INTOSAI Development Initiative (IDI) Periode 2020-2023.

# Ringkasan Eksekutif

2. BPK melalui Wakil Ketua BPK terpilih sebagai Anggota Independent Audit Advisory Committee (IAAC) PBB.
3. BPK terpilih menjadi Ketua ASEANSAI *Task Force on Legal Capacity*.
4. BPK menerima penghargaan INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) atas visualisasi hasil pemeriksaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum serta menyampaikan presentasi terkait rencana *Training on SDGs* dan pemeriksaan atas kontribusi energi terbarukan pada WGEA *Assembly* ke-20.
5. BPK meraih predikat sebagai Badan Publik Menuju Informatif.

Atas capaian ini, BPK tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara terus-menerus atas pengelolaan kinerja di tengah lingkungan yang terus berubah secara dinamis.



# **PENDAHULUAN**

## **LATAR BELAKANG**

### **TENTANG BPK RI**

- Profil dan Sejarah Singkat
- Tugas dan Wewenang
- Pemangku Kepentingan
- Kedudukan dan Peran
- Susunan Anggota BPK
- Struktur Pelaksana BPK
- Sumber Daya
- Isu Strategis BPK



### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, menyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Sementara itu, penerapan di lingkungan internal BPK salah satunya didukung dengan Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020—2024. Proses penyusunan indikator kinerja dimulai dengan penyusunan Renstra dan RIR BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan Eselon II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Proses pengukuran dan pengelolaan data kinerja di BPK dilakukan melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. *Output* dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I, dan LAKIN BPK Tahun 2020.



## B. Tentang BPK

### Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (UU). Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) hanya mempunyai sembilan orang pegawai dan sebagai Ketua BPK pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, BPK RI dengan suratnya tanggal 12 April 1947 Nomor 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara. Untuk sementara, BPK RI masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu sebagai dasar bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR).

Dalam Penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 Nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (DPK) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPK di Yogyakarta. DPK RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka DPK RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan BPK berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor DPK RIS. Personalial DPK RIS diambil dari unsur BPK di Yogyakarta dan dari *Algemene Rekenkamer* di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian DPK berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi BPK berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun BPK berubah-ubah menjadi DPK RIS berdasarkan konstitusi RIS DPK RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi BPK berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan BPK, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 (LN Nomor 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU Nomor 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.



Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan Nomor X/MPRS/1966 kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, BPK telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu sebagai berikut.

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

## Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK tersebut antara lain meliputi:

1. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (Pasal 6 ayat (1));
2. melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 ayat (5));
3. menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya (Pasal 7 ayat (1));
4. menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 8 ayat (1));

5. melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (Pasal 8 ayat (3)); dan
6. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 ayat (5)).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah.

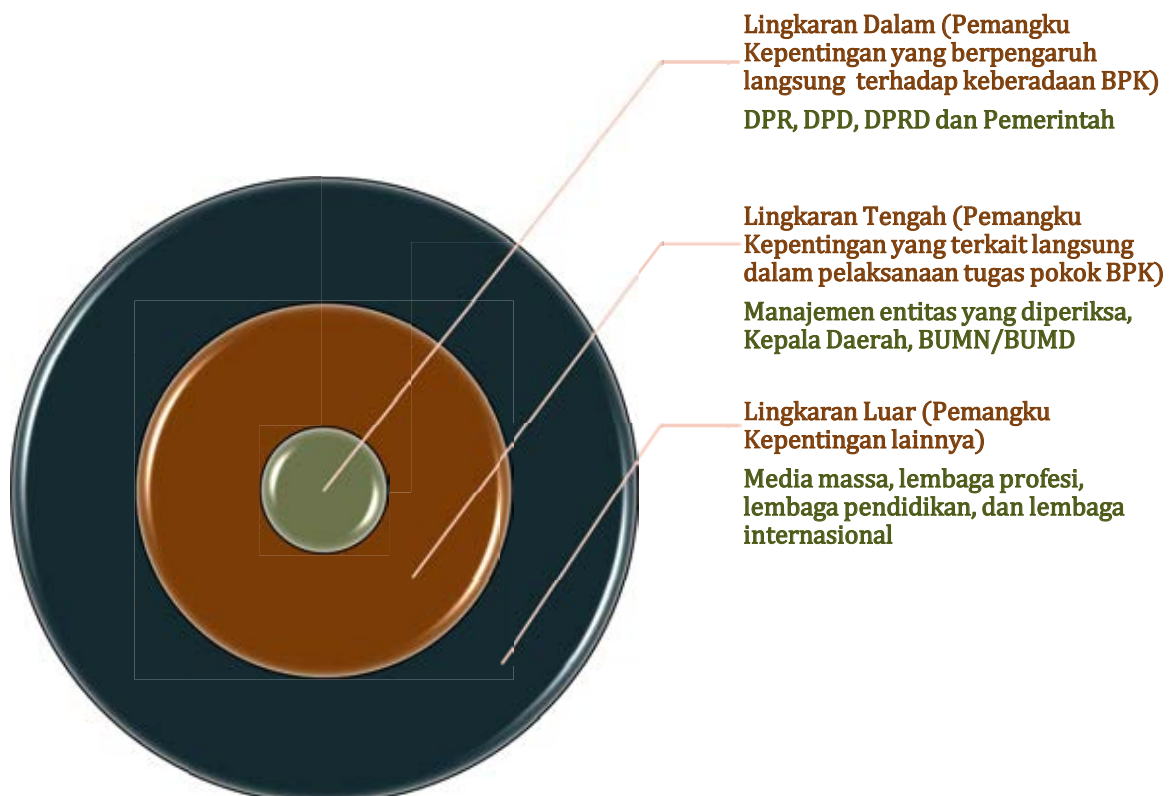
Dalam menjalankan tugas dan wewenang di atas, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK.

## Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan BPK meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD dan DPRD, pemerintah, entitas/*auditee* yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.

Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya. Gambar 2 menunjukkan para pemangku kepentingan BPK.



Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemangku kepentingan dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Kualitas hubungan ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan atas hasil kerja BPK atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut. Dengan lingkaran tengah, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu BPK juga mengelola *database* hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjutnya yang disertai penetapan pedoman dan mekanismenya.

Terkait media massa, BPK menciptakan bentuk komunikasi dalam rangka memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Dengan lembaga profesi misalnya Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK menyosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan *database* KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hubungan dengan lembaga pendidikan, BPK mengadakan kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, *workshop*, dan sebagainya. Untuk tujuan memelihara hubungan dengan lembaga audit (*Supreme Audit Institution*) negara lain, BPK melakukan kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan *peer review*, kerja sama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksaan dalam bentuk pelatihan. Selain itu, BPK juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Kedudukan dan Peran

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E dan 23G, yang menempatkan BPK sebagai satu lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran. Peningkatan peran tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model* yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi berikut.



Gambar 3 - Model Kematangan Organisasi BPK

Meningkatnya posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban, dan harus sejalan dengan misi BPK dalam memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Sebagai suatu organisasi, BPK melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.



## Susunan Anggota BPK

BPK terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK beserta bidang tugasnya.



Ketua (merangkap Anggota) BPK RI  
Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.



Wakil Ketua (merangkap Anggota) BPK RI  
Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CfrA.



Anggota I BPK RI  
Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng.,  
M.H., CFrA., CSFA.



Anggota II BPK RI  
Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si.,  
CFrA., CSFA.



Anggota III BPK RI  
Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.



Anggota IV BPK RI  
Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.



Anggota V BPK RI  
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.,  
CIPM, CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.



Anggota VI BPK RI  
Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CfrA.



Anggota VII BPK RI  
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK

## Struktur Pelaksana BPK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 34. Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK dituangkan dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Berikut Struktur Pelaksana BPK Tahun 2020.



Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK

Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon I pelaksana BPK beserta satuan kerja di bawahnya yaitu sebagai berikut.

## Sekretariat Jenderal

- Tugas: menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK
- Susunan Organisasi: Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi dan Biro Umum

## Staf Ahli

- Tugas: memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, kecuali bidang tugas Sekretariat Jenderal, Itama, Direktorat Utama, AKN, dan Auditorat Utama Investigasi
- Susunan Organisasi: Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko

## Badiklat PKN

- Tugas: merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan bagi Pelaksana BPK dan pendidikan dan pelatihan bagi pihak di luar BPK, menyelenggarakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, serta akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara.
- Susunan Organisasi: Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Diklat PKN, Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN, Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat PKN, Sekretariat Badiklat PKN, dan Balai Diklat di lingkungan Badiklat PKN

## Inspektorat Utama

- Tugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK
- Susunan Organisasi: Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, dan Inspektorat Penegakan Integritas

## Ditama Revbang

- Tugas: merumuskan perencanaan strategis, manajemen perubahan, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan
- Susunan Organisasi: Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan

## Ditama Binbangkum

- Tugas: memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum kepada Anggota BPK dan/atau pegawai pada Pelaksana BPK, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah
- Susunan Organisasi: Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah dan Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum

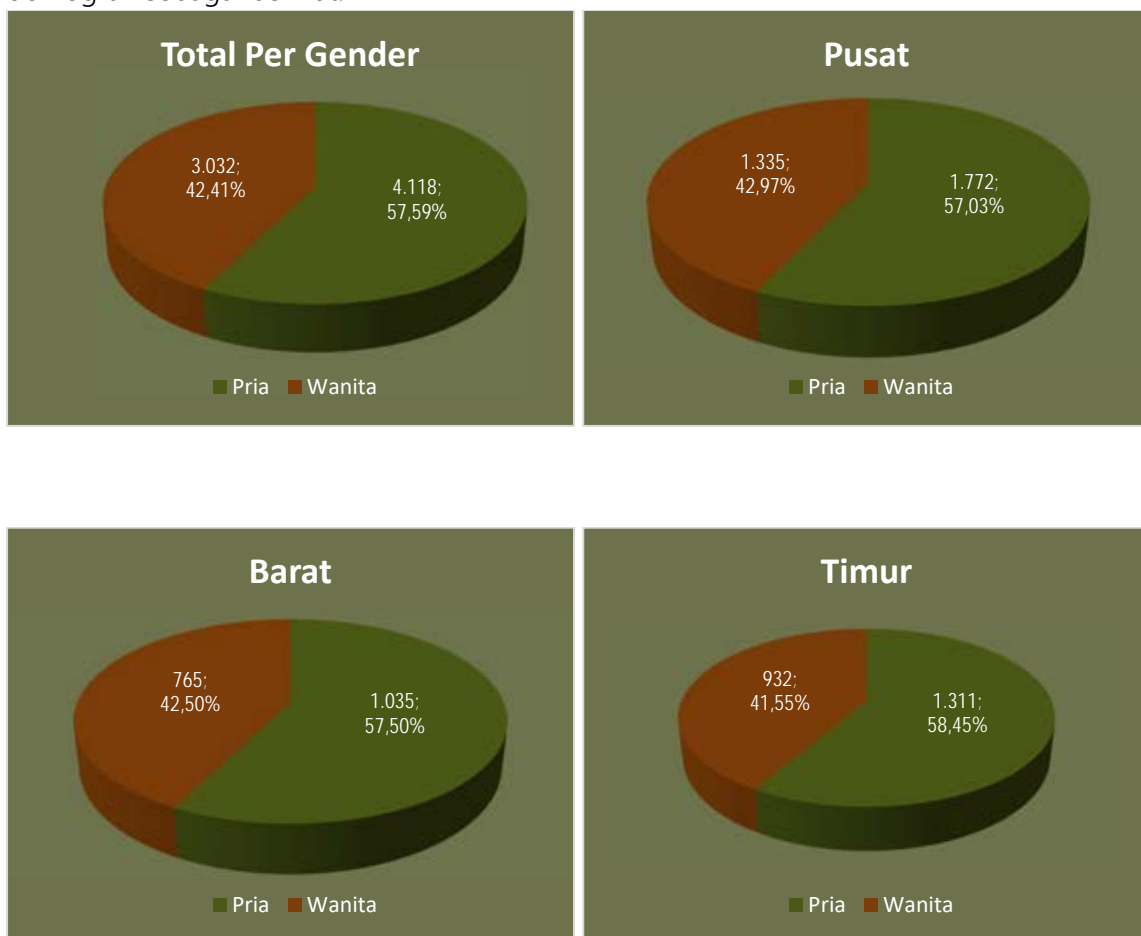
Keenam unsur pelaksana BPK tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Di luar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada masing-masing Anggota, yang tidak merangkap Ketua dan Wakil Ketua BPK, yaitu sebagai berikut.

<p style="text-align: center;"><b>Auditorat Utama Keuangan Negara I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan</li> <li>• Susunan Organisasi: Auditorat I.A, Auditorat I.B, Auditorat I.C, Auditorat I.D, Sekretariat AKN I</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Auditorat Utama Keuangan Negara II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional</li> <li>• Susunan Organisasi: Auditorat II.A, Auditorat II.B, Auditorat II.C, Auditorat II.D, Sekretariat AKN II</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Auditorat Utama Keuangan Negara III</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi</li> <li>• Susunan Organisasi: Auditorat III.A, Auditorat III.B, Auditorat III.C, Auditorat III.D, Sekretariat AKN III</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Auditorat Utama Keuangan Negara IV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur</li> <li>• Susunan Organisasi: Auditorat IV.A, Auditorat IV.B, Auditorat IV.C, Sekretariat AKN IV</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Auditorat Utama Keuangan Negara V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, dan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatra dan Jawa.</li> <li>• Susunan Organisasi: Auditorat V.A, Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, Sekretariat AKN V, dan 16 BPK Perwakilan Wilayah Barat</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Auditorat Utama Keuangan Negara VI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kemenkes, BPOM, dan Kemendikbud dan Perguruan Tinggi Badan Hukum, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua</li> <li>• Susunan Organisasi: Auditorat VI.A, Auditorat VI.B, Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, Sekretariat AKN VI, dan 18 BPK Perwakilan Wilayah Timur</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Auditorat Utama Keuangan Negara VII</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Keayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara)</li> <li>• Susunan Organisasi: Auditorat VII.A, Auditorat VII.B, Auditorat VII.C, Auditorat VII.D, Sekretariat AKN VII</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Auditorat Utama Investigasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas: Pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli</li> <li>• Susunan Organisasi: Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat, Auditorat Investigasi Keuangan Daerah, Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Sekretariat Auditorat Utama Investigasi</li> </ul>	

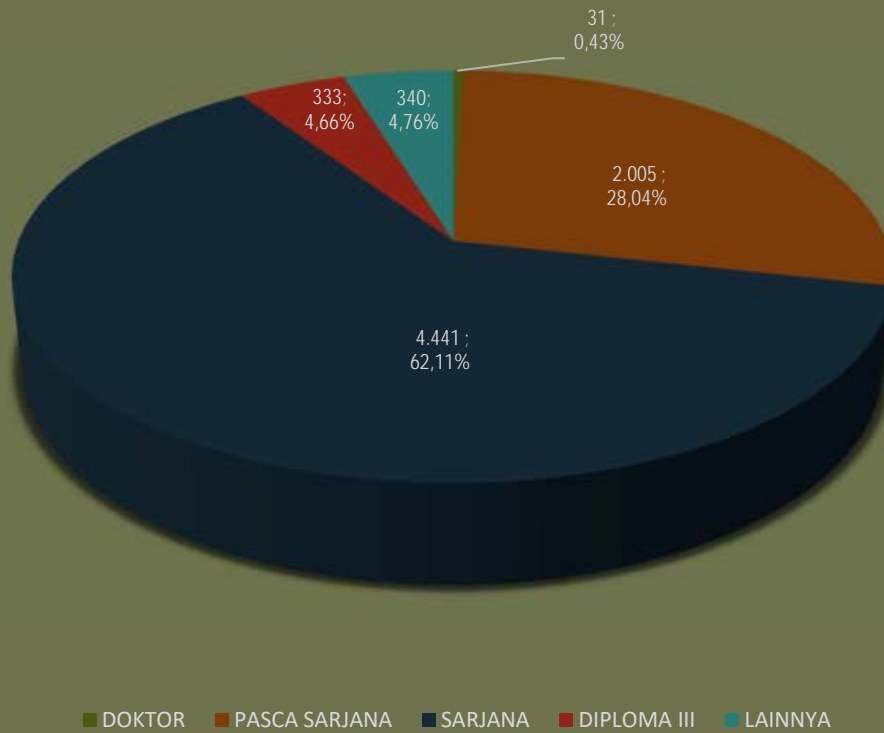
## Sumber Daya

BPK telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkan *Human Resources Management Plan (HRM Plan)* di mana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karier, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.

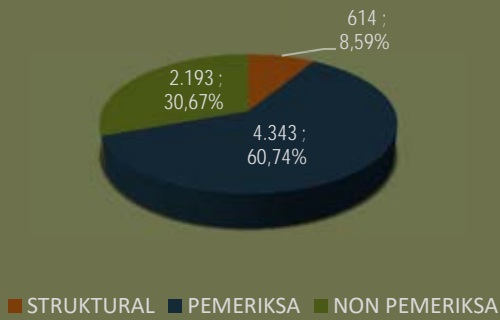
Sampai dengan akhir Tahun 2020, jumlah SDM BPK mencapai 7.150 orang dengan profil demografi sebagai berikut:



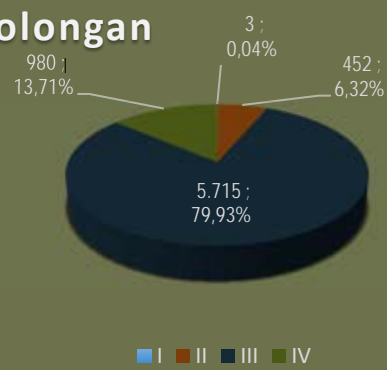
## Pendidikan



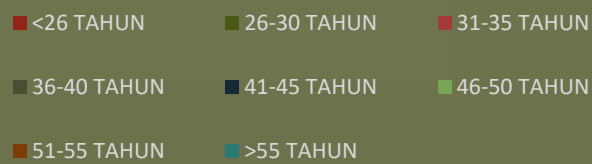
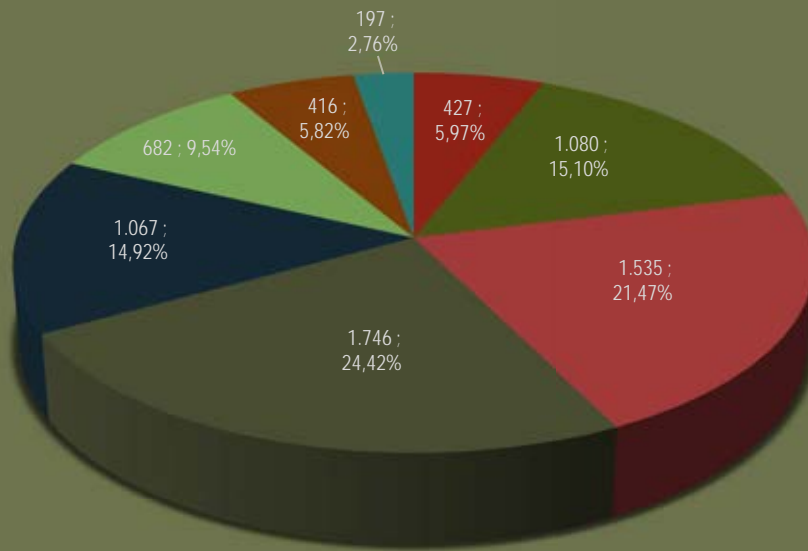
## Jenis Jabatan



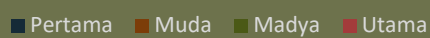
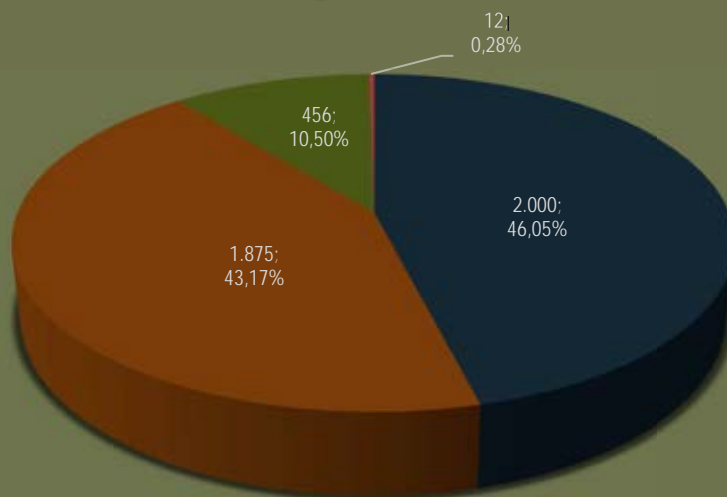
## Golongan



## USIA



## Jabatan Fungsional Pemeriksa





Selain Jabatan Fungsional Pemeriksa, BPK juga memiliki Jabatan Fungsional lainnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 - Profil SDM BPK menurut Jabatan Fungsional

No.	IKU	Realisasi Tahun 2020				Jumlah
		Pertama	Muda	Madya	Utama	
1	JF Pemeriksa	2.000	1.875	456	12	4.343
2	JF Widyaiswara	8	5	3	1	17
3	JF Arsiparis	1	1	8	0	10
4	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN	0	0	0	0	0
5	JF Analis Kebijakan Publik	0	0	0	0	0
6	JF Analis Anggaran	0	0	0	0	0
7	JF Analis Kepegawaian	0	0	0	0	0
8	JF Asesor SDM Aparatur	0	0	0	0	0
9	JF Medis Paramedis	0	1	5	3	9
10	JF Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0	0
11	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
12	JF Pranata Humas	0	0	0	0	0
13	JF Pranata Komputer	0	6	0	0	6
Jumlah		2.009	1.888	472	16	4.385

## Isu Strategis BPK

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK pada Tahun 2020 antara lain sebagai berikut.

1. Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum ke arah *impact*.
2. Jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya sudah  $\geq 75\%$  per Tahun 2020 baru mencapai realisasi 67,93% dari target sebesar 75%.
3. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK yang berisiko menurunkan reputasi BPK.
4. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus tuntutan perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan.

5. Perlunya peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat *IT Driven* untuk mendukung proses bisnis sesuai hasil *peer review*.
6. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan (diklat) BPK masih menghadapi permasalahan, antara lain: kualitas dan kuantitas SDM (pengelola dan fasilitator) belum mencukupi, kurikulum belum *link and match*, media pembelajaran belum komprehensif, *stakeholder* belum sinergis, dan tata kelola belum optimal.
7. BPK belum sepenuhnya mengimplementasikan Sistem Merit (kualifikasi, kompetensi dan kinerja) untuk perbaikan pengelolaan SDM BPK.
8. BPK belum sepenuhnya mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi.
9. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya perubahan cara kerja baru organisasi (*new normal*) bagi para pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



# **PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

## **PERENCANAAN STRATEGIS**

- Kerangka Renstra
- Peta Strategi
- Rencana Implementasi Renstra (RIR)

## **PERJANJIAN KINERJA**

- Indikator Kinerja Utama
- Rencana Kerja Tahunan
- Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP)
- Perjanjian Kinerja
- Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis SIMAK

## **RISIKO DAN MITIGASI RISIKO**

## **EVALUASI PERENCANAAN STRATEGIS**

- Evaluasi Indikator dan Target Kinerja
- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra BPK

### A. Perencanaan Strategis

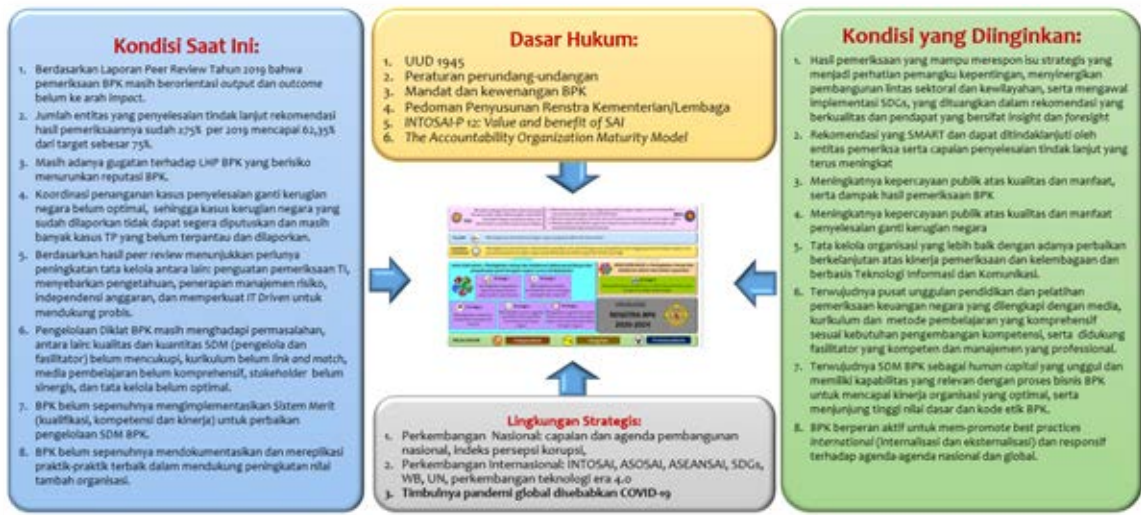
BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur di dalam UUD 1945. Secara khusus, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan perencanaan RPJMN 2020-2024 di mana pada periode Renstra sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dengan periode RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyusunan Renstra BPK 2020-2024 di samping menyelaraskan periode dengan agenda pemerintah juga dituntut untuk selalu tanggap dan responsif atas isu-isu aktual. Karena itu, Renstra BPK 2020-2024 selain menyesuaikan dengan periode RPJMN juga telah merespons dampak bencana pandemi Covid-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020-2024 ini disusun, di antaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

## Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020 – 2024



Gambar 6 - Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020-2024

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan dasar hukum, lingkungan strategis, dan kondisi saat ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020-2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

- hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
- rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
- meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
- meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;
- tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis TI dan Komunikasi;
- terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang dilengkapi dengan kurikulum, metode, dan media pembelajaran yang komprehensif sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi, serta didukung fasilitator yang kompeten dan manajemen yang profesional;



7. terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK; dan
8. terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global.

## Kerangka Renstra

Renstra BPK 2020-2024 sendiri merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pemeriksa Keuangan, yang menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan, dan kegiatan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk periode Tahun 2020-2024, Renstra BPK ditetapkan melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024 tanggal 2 November 2020. Dalam Renstra tersebut, BPK menetapkan visi, misi dan strategi, seperti dijabarkan sebagai berikut.

### VISI

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara."

Visi BPK 2020-2024 merupakan kelanjutan dari visi BPK pada Renstra periode sebelumnya yang mengedepankan peranan ke luar organisasi. Melalui visi ini, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya, baik lingkup nasional maupun internasional. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut.

### MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020-2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari.

### NILAI DASAR

Independensi, Integritas dan Profesionalisme

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020-2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020-2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.

### TUJUAN BPK 2020 - 2024

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut.

### SASARAN STRATEGIS BPK 2020 - 2024

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/D, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian negara yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, BPK memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan



masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (*mindset*), dan budaya kerja (*culture set*).

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis tersebut, BPK menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK; (2) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan; dan (3) nilai *quality assurance* reformasi birokrasi.

## Peta Strategi

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasionalisasi untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 7 - Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020-2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

## ARAH KEBIJAKAN 1

### Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

#### *Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis*

Strategi ini merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik secara nasional maupun global.

Ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 1 dapat dilihat dari indikator: (a) tingkat kepuasan atas integrasi perencanaan; (b) tingkat kematangan manajemen pengetahuan; (c) tingkat kematangan penerapan manajemen risiko; (d) tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan; (e) tingkat pemenuhan pendapat BPK; (f) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas ikhtisar hasil pemeriksaan; (g) tingkat pemenuhan pertimbangan atas SAP atau SPIP; (h) indeks mutu organisasi; (i) tingkat keterterapan perangkat lunak bidang pemeriksaan dan kelembagaan; dan (j) tingkat kualitas pelaporan hasil pemeriksaan BPK.

#### *Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif*

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif.

Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam RPJMN 2020-2024. Dengan memperhatikan unsur ini, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Pemeriksaan BPK memiliki karakteristik antisipatif dengan menangkap/memeriksa suatu isu, sebelum isu tersebut menjadi besar. Dengan demikian BPK dapat menjalankan perannya dalam mengantisipasi dampak dari sebuah kebijakan pemerintah, dan memprediksi risiko yang akan timbul di jangka menengah/jangka panjang. Selain itu, BPK juga harus tanggap dalam merespons isu strategis yang berkembang di lingkungan nasional maupun internasional, serta memperhatikan permintaan pemangku kepentingan dengan tetap mempertahankan independensi BPK.

Pemeriksaan BPK juga bersifat responsif atau lebih tanggap dalam menangkap isu strategis dan permintaan pemangku kepentingan. Sebagai lembaga pemeriksa yang independen, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemeriksaan. Namun, BPK juga dapat melaksanakan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari lembaga perwakilan, melakukan pemeriksaan investigasi, perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli berdasarkan permintaan dari Instansi Penegak Hukum (IPH)/ pemangku kepentingan lainnya. Untuk ke depannya, BPK akan lebih responsif dalam menangkap isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dan permintaan investigasi dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Salah satu upaya yang akan dilakukan BPK dalam menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah adalah dengan menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) 2020-2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut. Dalam melaksanakan pemeriksaan SDGs, BPK menerapkan panduan dari IDI's SDGs *Audit Model* (ISAM) yang dibuat berdasarkan ISSAI.

Penyelarasan tema untuk pemeriksaan tematik nasional difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara lintas satker sebagai sarana untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker di BPK untuk menghasilkan rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih komprehensif sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 8 - Focal Point BPK 2020-2024

Dari gambar tersebut, penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan RPJMN/RPJMD 2020-2024 akan dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

Selain itu, BPK juga mengantisipasi adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode Renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat, dengan mengakomodasi pada pemeriksaan signifikan lainnya. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal, dengan mempertimbangkan kecukupan sumber daya dan kapasitas anggaran yang tersedia. Dalam konteks merespons terjadinya pandemi Covid-19, BPK dapat melaksanakan Pemeriksaan Tematik Penanganan Pandemi Covid-19 secara menyeluruh mengenai penanganan pandemi dan tata kelola dalam menghadapi dampaknya seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional, *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah, serta tata kelola pelaksanaan tugas pemerintahan pascapandemi.

Keberhasilan strategi pemeriksaan ini akan diukur dengan indikator: (a) tingkat implementasi strategi pemeriksaan; (b) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; (c) tingkat pemenuhan pemeriksaan atas permintaan para pemangku kepentingan; (d) tingkat pemanfaatan *big data analytics*; (e) tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan; (f) pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan; dan (g) tingkat pemanfaatan hasil investigasi.

### ***Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara***

Strategi ini merupakan strategi BPK untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan dan kelembagaan bagi seluruh satker di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK. Keberhasilan BPK dalam melakukan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara diukur dengan indikator: (a) tingkat kematangan SPI; (b) indeks efektivitas pelaksanaan pengawasan internal; (c) tingkat pemenuhan satker yang telah berpredikat WBK/WBBM; (d) tingkat penegakan kode etik dan disiplin; (e) tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal; dan (f) tingkat pemenuhan kriteria IACM (*Internal Audit Capability Model*) Level 4.

### ***Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara***

Strategi ini merupakan strategi BPK dalam mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan menghasilkan ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi lembaga pendidikan keuangan negara yang lain.

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Diklat diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi peserta pascadiklat, dan implementasi materi diklat pada organisasi sehingga kinerja BPK semakin baik.

BPK akan mengukur keberhasilan dalam mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Untuk itu, indikator yang relevan dengan keberhasilan Strategi 4, yaitu: (a) tingkat pemenuhan peningkatan kinerja satuan kerja; (b) persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya; (c) tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja alumni diklat; (d) persentase lulusan diklat dengan predikat minimal "memuaskan"; (e) indeks kepuasan peserta diklat dan peserta sertifikasi; (f) tingkat pemenuhan implementasi program sertifikasi dan akreditasi; dan (g) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Badiklat PKN.

### ***Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara***

BPK merumuskan strategi ini karena pelaksanaan tugas dan wewenangnya sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, BPK perlu meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara agar dampak pemulihannya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.



Ukuran keberhasilan dalam pencapaian strategi di atas dapat dilihat dari indikator: (a) tingkat pemenuhan bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK; (b) tingkat pemenuhan penyusunan dan penyempurnaan peraturan BPK; (c) tingkat pemenuhan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK; (d) tingkat penyelesaian kasus kerugian oleh bendahara dan pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD; dan (e) tingkat pemenuhan bahan pertimbangan BPK dalam penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR.

## ARAH KEBIJAKAN 2

### Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

#### *Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan*

Strategi ini merupakan perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan.

Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung atau tidak langsung bagi BPK yang meliputi lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta lembaga-lembaga internasional. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam mengukur keberhasilan strategi pengelolaan sumber daya yang optimal dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, indikator yang digunakan antara lain: (a) tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi; (b) penilaian penerapan sistem merit; (c) opini LK BPK; (d) tingkat kinerja anggaran BPK; (e) penilaian penerapan SPBE; dan (f) indeks kebahagiaan pegawai.

## Rencana Implementasi Renstra (RIR)

RIR 2020-2024 merupakan dokumen yang menjembatani implementasi Renstra BPK 2020-2024 dari rencana lima tahunan menjadi rencana tahunan sehingga seluruh satker dapat berkontribusi sesuai dengan lingkup strategi yang telah ditetapkan. Tujuan dibentuknya RIR

2020-2024 adalah untuk memudahkan seluruh satker dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh tujuan dalam Renstra BPK 2020-2024. Adapun manfaat RIR 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. menjadi panduan satker dalam menyusun Renstra satker dalam rangka *cascading* Renstra BPK Wide;
2. memberikan informasi kebutuhan sinergi dan dukungan antar satker;
3. menjadi panduan satker dalam penyusunan anggaran dan rencana tahunan dengan adanya detail rincian kegiatan yang telah ditentukan baik kegiatan rutin maupun kegiatan prioritas strategis;
4. memberikan gambaran bagi satker terkait aktivitas untuk setiap indikator kinerja agar capaian kinerja dapat terpantau dan terukur dengan baik;
5. memberikan informasi kepada satker tentang kegiatan prioritas strategis serta kapabilitas yang dibutuhkan; dan
6. memberikan gambaran rincian kegiatan untuk menunjukkan runutan *logical framework* yang digunakan.

RIR 2020-2024 menjelaskan rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap satker untuk mencapai indikator kinerja dalam rangka dukungan aktivitas masing-masing satker terhadap Sasaran Strategis BPK dalam Renstra BPK 2020-2024. Penjabaran atas sasaran, indikator kinerja, dan aktivitas-aktivitas serta hubungannya satu sama lain dalam mendukung pencapaian tujuan diilustrasikan dalam Matriks Rencana Implementasi Renstra. RIR juga mengidentifikasi kebutuhan sinergi dan dukungan antar satker, serta menjabarkan *cascading* indikator kinerja BPK menjadi indikator kinerja di setiap satker sebagai gambaran utuh kontribusi setiap elemen di BPK dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Renstra BPK 2020-2024.

RIR 2020-2024 juga menjelaskan tema dan fokus pemeriksaan BPK dalam kurun 2020-2024. Hal ini sesuai dengan arah pemeriksaan yang ditetapkan Renstra BPK 2020-2024. Oleh karena itu, RIR akan mengungkapkan bentuk koordinasi pemeriksaan yang meliputi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) penanggung jawab fokus pemeriksaan, simpulan yang dapat diberikan BPK atas fokus pemeriksaan pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024, tujuan pemeriksaan strategis, serta entitas pemeriksaan yang terkait. Lebih lanjut, RIR 2020-2024 mendetailkan mekanisme pemantauan atau monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi Renstra BPK 2020-2024.

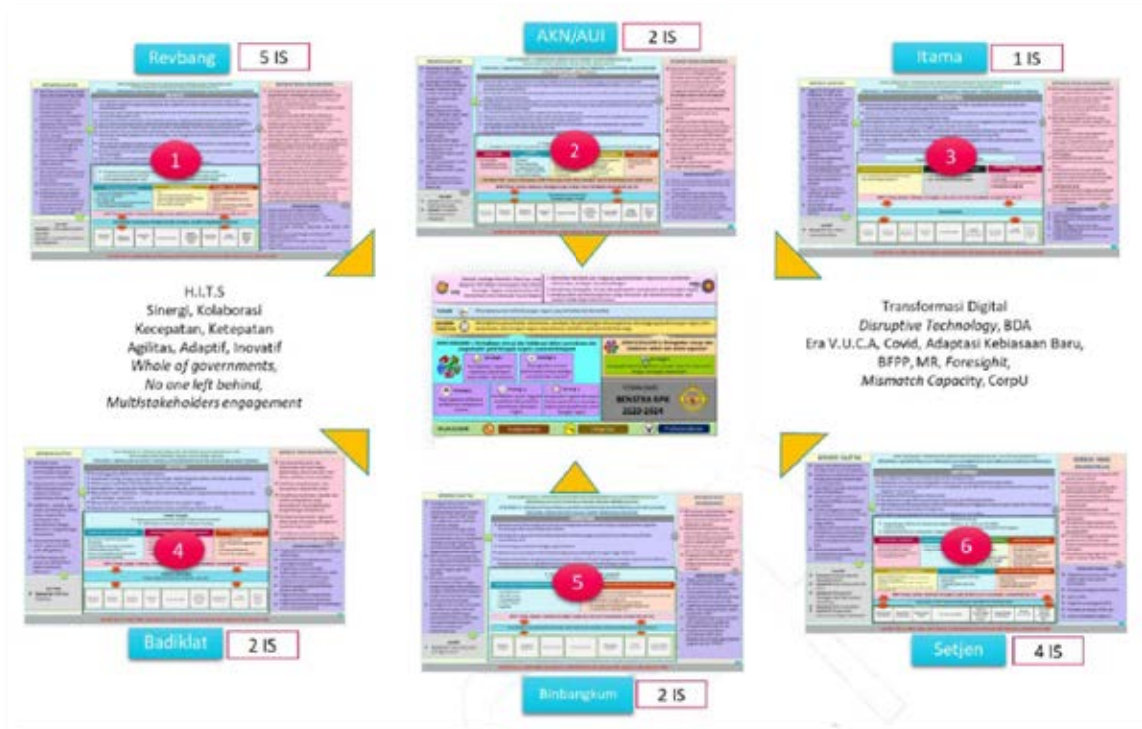
Dokumen RIR 2020-2024 menjabarkan keterkaitan antara sasaran, indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, dan aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian target indikator, baik di tingkat BPK, Eselon I, maupun Eselon II. Hal ini dilakukan untuk memberikan kerangka atas pengelolaan kegiatan yang harus dilakukan di setiap satker. Dokumen RIR 2020-2024 juga akan memuat detail rincian aktivitas baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan prioritas yang dijabarkan menjadi inisiatif strategis.

Pencapaian target kinerja dilaksanakan setiap satker melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis, maupun melalui kegiatan inisiatif yang juga bersifat strategis. Pelaksanaan kegiatan



tersebut diharapkan mampu menghasilkan keluaran-keluaran yang memberikan manfaat tambahan bagi organisasi dan para pemangku kepentingan. Kegiatan rutin strategis merupakan kegiatan yang dilakukan satker sehari-hari berdasarkan tugas dan fungsi satker sebagaimana telah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kegiatan rutin strategis diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi yang terlihat dari capaian IKU BPK *Wide*. Sedangkan kegiatan Inisiatif Strategis (IS) adalah kegiatan proyek yang melibatkan beberapa satker, serta mempengaruhi secara langsung capaian manfaat yang diukur melalui IKU BPK *Wide*. IS dibutuhkan jika kegiatan rutin belum cukup memadai dalam mendorong pencapaian manfaat.

Bentuk sinergi dan kolaborasi antar strategi pada Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



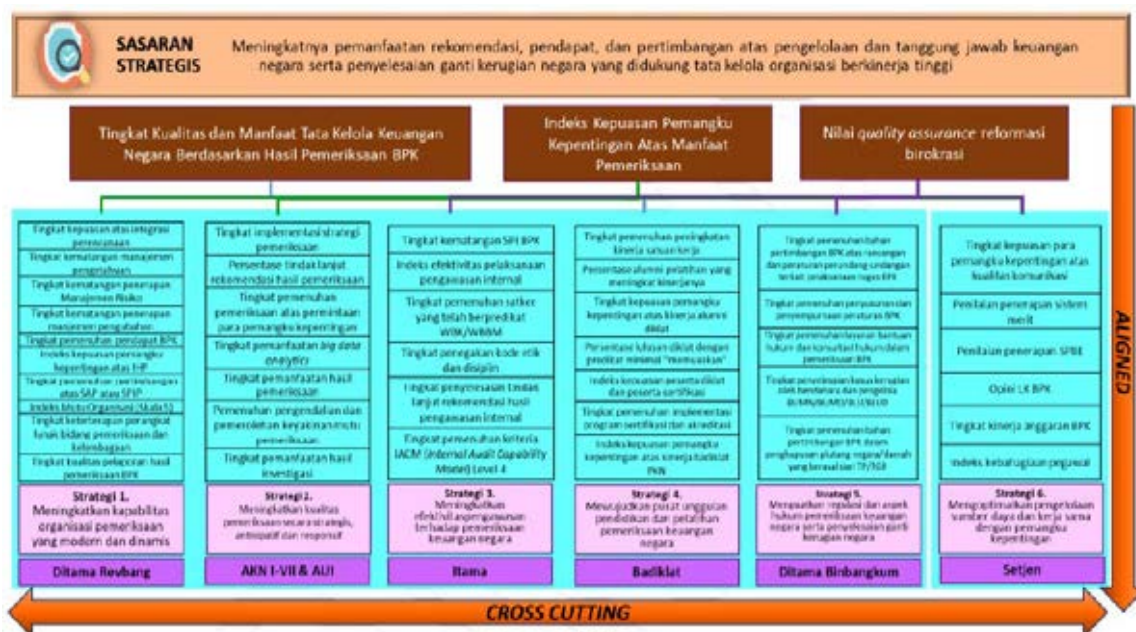
Gambar 9 - Sinergi dan Kolaborasi antar Strategi Renstra BPK 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan hubungan dan keterkaitan antar strategi dalam mendukung visi dan misi Renstra BPK 2020-2024. Keberhasilan atas pencapaian visi dan misi tersebut memerlukan sinergi dan kolaborasi dalam implementasi strategi-strategi. Implementasi strategi juga perlu mengidentifikasi *fast gain* dan *quick win* sebagai bagian dari *milestone* implementasi.

Selain itu, implementasi dari setiap strategi tersebut juga perlu didukung dengan penerapan transformasi digital, perencanaan yang bersifat holistik, integratif, tematik, dan spasial (H.I.T.S), adanya sinergi dan kolaborasi yang memperhatikan kecepatan, ketepatan, agilitas, adaptif, dan inovatif, serta dengan menerapkan prinsip *no one left behind*. Sinergi dan kolaborasi antar strategi tersebut juga perlu disesuaikan untuk dapat menghadapi era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity*) yang penuh ketidakpastian, adanya *disruptive technology*, serta kondisi normal baru sebagai dampak pandemi Covid-19.

Strategi yang diterapkan juga perlu menerapkan BPK *Framework of Professional Pronouncements* (BFPP), manajemen risiko, *big data analytics*, dengan mempertimbangkan adanya *mismatch capacity* antar Satker, serta didukung oleh pengembangan kompetensi pegawai melalui BPK *Corporate University*.

Sinergi dan kolaborasi dalam implementasi strategi-strategi untuk mencapai sasaran strategis juga ditunjukkan pada pola keterkaitan indikator kinerja antar strategi, baik secara *aligned* maupun *cross-cutting*. *Aligned* berarti adanya keselarasan secara horizontal, yang terlihat dari kaskade atau penurunan kinerja dari atas ke bawah (*top-down*), yaitu dari level sasaran strategis ke strategi. Hal ini dilakukan agar target kinerja yang dirumuskan, telah selaras dan sudah sesuai dari level organisasi sampai level satker. Sedangkan *cross-cutting* adalah keselarasan secara vertikal atau lintas sektoral, hal ini terlihat dari adanya sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dalam mencapai target kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang saling mendukung dan terkait. Kaskade atau penurunan indikator kinerja yang menghubungkan sasaran strategis dan strategi secara *aligned* dan *cross-cutting* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 10 - Kaskade Indikator Kinerja yang Menghubungkan Sasaran Strategis dan Strategi

Seluruh indikator kinerja di Sasaran Strategis pada level BPK *Wide* diturunkan ke indikator kinerja di Strategi yang diampu oleh masing-masing Eselon I. Hal ini untuk menjaga keselarasan antar unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal. Kaskade ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi dan melihat hubungan antar masing-masing indikator, serta melihat bagaimana kontribusi dari masing-masing indikator kinerja dalam mendukung tercapainya indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis didukung oleh pencapaian indikator kinerja program pada setiap strategi yang diampu oleh setiap Eselon I.

## B. Perencanaan Kinerja Tahunan

### Indikator Kinerja Utama

Pengelolaan Renstra BPK yang diilustrasikan dalam Peta Strategi dilengkapi dengan visualisasi atas tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan BPK. Pada tahap perencanaan, untuk memantau pencapaian tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan BPK tersebut, telah ditetapkan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK di mana setiap IKU telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra.

Dengan demikian, tahap perencanaan pada manajemen kinerja meliputi kegiatan penentuan target kinerja dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PK ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua BPK, dan para Anggota BPK selaku Badan, Eselon I dan Eselon II. PK memuat peta strategi, sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan anggaran, IKU, Indikator Kinerja Keluaran (IKK), serta target IKU dan IKK yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit dan Satuan Kerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja Tahun 2020, pada tanggal 31 Januari 2020, telah dilakukan penetapan atas PK BPK, 13 PK Eselon I, lima PK Staf Ahli, dan 74 PK satker Eselon II. Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja secara *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound (SMART)*. Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2020–2024, BPK menetapkan satu tujuan dan satu sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama, sebagai berikut.

Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	1	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	73%*	76%	79%	82%
		2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,10 (Sangat Memuaskan)	4,20 (Sangat Memuaskan)	4,30 (Sangat Memuaskan)	4,40 (Sangat Memuaskan)	4,50 (Sangat Memuaskan)
		3	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,42 (A)	88,72 (A)	89,02 (A)	89,32 (A)	89,62 (A)

\*) Berdasarkan hasil pertimbangan dari Sidang BPK II pada 27 Januari 2021, usulan target IKU 1 untuk Tahun 2021 diusulkan untuk tetap sama seperti target IKU 1 di Tahun 2020.

## Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah pedoman operasional bagi seluruh satuan kerja di BPK dalam menyusun Renja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK, Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP), dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) Tahun 2021. Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam RKT mengatur mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

## Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang

BPK menerjemahkan RKT Tahun 2020 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana di BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen/Penunjang (RKP/RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, beserta dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk *monitoring* pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

## Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi antara lain pernyataan kesanggupan pegawai, peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target IKU, Program, dan Anggaran, serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dengan demikian, PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PK memuat peta strategi, sasaran strategis, IKU beserta targetnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja Tahun 2020, pada tanggal 31 Januari 2020, telah dilakukan penandatanganan atas PK BPK, 13 PK Eselon I, lima PK Staf Ahli, dan 74 PK Eselon II. Berikut adalah IKU dan target IKU BPK Tahun 2020 yang tertuang dalam PK BPK 2020.





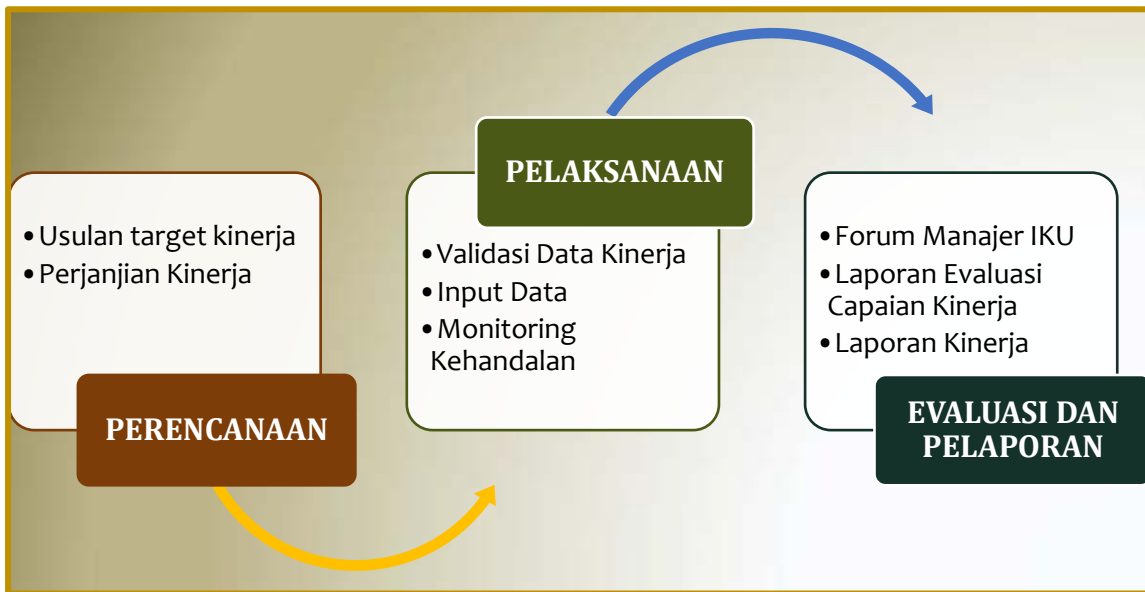
Gambar 11 - Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2020

## Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK Tahun 2020-2024, BPK menggunakan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen kinerja yang bekerja secara *online* serta berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, sejak Tahun 2018, aplikasi yang digunakan untuk implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA).

Implementasi manajemen kinerja dilakukan berdasarkan POS Pengelolaan Kinerja BPK Berbasis SIMAK yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 320/K/X-XIII.2/7/2011.

Pengelolaan SIMAK dapat digambarkan sebagai suatu siklus tahunan yang dikelompokkan menjadi tiga tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan pelaporan, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 12 - Siklus Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal, dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU/IK diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik. Data yang diinput tersebut adalah data yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker. Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memperbandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja.

Sejak Tahun 2018, pelaksanaan pengukuran kinerja menggunakan Aplikasi PRISMA yang dikembangkan Direktorat PSMK bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi. Aplikasi ini sedang tahap pengembangan modul kinerja pegawai dan manajemen risiko.

### C. Risiko yang Mempengaruhi Sasaran Strategis/Strategi

Dinamika organisasi menunjukkan adanya penyesuaian organisasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal organisasi, dalam hal ini BPK menyadari pentingnya pengelolaan risiko yang akan berdampak dalam pencapaian sasaran organisasi. Penerapan Manajemen Risiko di BPK merupakan salah satu bentuk dukungan dalam implementasi Renstra BPK 2020-2024 untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran organisasi BPK. Penerapan Manajemen Risiko di BPK dilakukan dengan memperhatikan konteks (lingkungan), lingkup dan kriteria risiko. Konteks disini meliputi konteks internal dan eksternal. Konteks internal antara lain meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pimpinan dan proses bisnis. Konteks eksternal antara lain meliputi pemangku kepentingan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, isu-isu strategis, dan risiko baru (*emerging risks*). Perubahan dari kedua konteks

tersebut dimungkinkan mendorong terjadinya peristiwa risiko yang berpengaruh dalam pencapaian sasaran strategis/strategi BPK.

Untuk menghadapi dinamika tersebut, pimpinan BPK berkomitmen menciptakan dan melindungi nilai organisasi BPK dengan memastikan BPK memiliki kapabilitas untuk menangani risiko. Sebagai bentuk komitmen penerapan manajemen risiko, BPK telah menetapkan Keputusan BPK RI Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK.

Untuk penerapannya, BPK telah menandatangani Piagam Manajemen Risiko Tahun 2020 yang merupakan tahun ketiga penerapan manajemen risiko di BPK. Dokumen ini merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan profil risiko BPK yang ditampilkan dalam bentuk *dashboard* risiko dan disertai dengan rencana penanganan risiko. Berdasarkan dokumen tersebut, BPK telah mengidentifikasi risiko-risiko berdasarkan aktivitas (proses bisnis) di BPK, baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan, yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategi, IKU dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2020 dan rencana penanganannya yang melibatkan seluruh unit/satker di Lingkungan BPK. Rencana penanganan risiko telah ditetapkan pada awal tahun, untuk dipantau pelaksanaannya pada tiap semester berakhir. Laporan pemantauan terhadap penanganan risiko akan dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko BPK Tahun 2020. Uraian lebih lanjut atas risiko dan rencana penanganannya akan dijelaskan di sasaran strategis pada bab selanjutnya.

## D. Evaluasi Perencanaan Strategis

### Evaluasi Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 297/K/X-XIII.2/7/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis BPK, salah satu bagian dari siklus penyusunan Rencana Strategis BPK adalah evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah upaya untuk mendapatkan informasi keberhasilan atau kegagalan dan capaian strategi. Aktivitas utama dalam evaluasi strategi yaitu mereviu faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar dari strategi saat ini, mengukur kinerja, dan mengambil langkah-langkah koreksi. Salah satu dari langkah koreksi yang dilakukan oleh BPK selama periode Renstra BPK 2020-2024 adalah evaluasi atas indikator dan target kinerja.

#### 1. Evaluasi atas Indikator Kinerja

Secara spesifik, evaluasi atas indikator kinerja diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 514/K/X-XIII.2/12/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penyusunan dan Pengembangan Indikator Kinerja BPK. Evaluasi atas indikator kinerja BPK dilakukan secara periodik untuk memastikan agar indikator-indikator kinerja yang ada dapat



mengukur pencapaian strategi secara spesifik, relevan, akurat, dan representatif. Oleh karena Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode Renstra BPK Tahun 2020-2024 sehingga indikator kinerja yang disajikan pada Bab III adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024.

## 2. Evaluasi atas Target Kinerja

Secara spesifik, evaluasi atas target kinerja diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 124/K/X-XIII.2/3/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK. Evaluasi atas target kinerja dilakukan setiap tahun untuk memastikan agar target kinerja tahunan yang ditetapkan mampu menjembatani secara rasional antara kapasitas organisasi saat ini dan tuntutan dari para pemangku kepentingan. Untuk keperluan penyajian laporan, target kinerja yang disajikan pada Bab III merupakan target kinerja yang direncanakan pada awal tahun Periode Renstra BPK 2020-2024.

### Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra BPK

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat organisasi. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan rencana pengembangan kelembagaan BPK adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian IKU, kegiatan, adopsi keluaran (*output*) oleh pegawai, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode pembangunan berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan *baseline* data dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan Renstra dan RIR; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

Data perkembangan pelaksanaan Renstra diolah dari sistem aplikasi yang memantau progres pelaksanaan kegiatan inisiatif satker, laporan bulanan satuan kerja, serta capaian atas indikator utama. Mekanisme pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini. Waktu pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kelembagaan dilakukan secara periodik sesuai tingkatannya yaitu bulanan di tingkat satker Eselon II dan Eselon I, triwulanan, semesteran, dan tahunan di tingkat BPK. Data untuk pelaksanaan evaluasi berasal dari data laporan bulanan satker dan pengelola IS, hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian IKU, hasil evaluasi diklat, serta hasil revidi utama. Evaluasi dilakukan atas pencapaian kegiatan dengan fokus pemantauan adalah pada *progress* ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan anggaran, dan capaian keluaran. Evaluasi

juga dilakukan atas capaian IKU, evaluasi atas tingkat adopsi oleh para pegawai serta evaluasi atas kebijakan strategis untuk memastikan adanya relevansi antara kegiatan dengan Renstra, kualitas keluaran yang dihasilkan, dampak atau manfaat yang dapat direalisasikan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, serta memastikan adanya keberlanjutan dari perubahan yang dilakukan seturut agenda Renstra.

Pembahasan atas hasil evaluasi ini dilakukan melalui berbagai forum rapat antara lain rapat teknis, Forum Eselon I, Rapat Koordinasi Pelaksana BPK, Rapat Kerja Pelaksana BPK, dan Rapat Koordinasi Teknis di tingkat satuan kerja Eselon I. Evaluasi yang telah dijelaskan tersebut adalah untuk evaluasi atas pelaksanaan Renstra. Selain itu, setiap tahun BPK akan melakukan reviu dan evaluasi atas substansi Renstra untuk memastikan relevansi Renstra BPK dengan kondisi yang terjadi di internal dan eksternal organisasi. Hasil reviu atas Renstra akan dapat mengubah rumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi atau rumusan atas indikator kinerja utama, dan targetnya.





# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

- Sasaran Strategis
- IKU 1
- IKU 2
- IKU 3
- Strategi 1
- Strategi 2
- Strategi 3
- Strategi 4
- Strategi 5
- Strategi 6
- Indikator Kinerja Generik

**REALISASI DAN  
DUKUNGAN PROGRAM  
PENGANGGARAN UNTUK  
MENUNJANG  
KEBERHASILAN  
PENCAPAIAN KINERJA  
SERTA ANALISIS EFISIENSI  
PENGUNAAN SUMBER  
DAYA**




**KINERJA DAN CAPAIAN  
LAINNYA**

**TANTANGAN MASA  
DEPAN**

Pengelolaan kinerja BPK dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input. Dalam pengukuran tersebut maka terjadilah secara bertahap mulai dari proses *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh pengelola kinerja Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) maupun pelaksana kinerja di tiap Satuan Kerja di Lingkungan BPK.

Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja di-*input* oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA.
2. Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai targetnya) yaitu:
  - a. *maximize* - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target;
  - b. *minimize* - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target; dan
  - c. *stabilize* - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu.
3. Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

Color Range	Deskripsi
	Skor $\geq$ 100
	$80 \geq$ Skor $<$ 100
	Skor $<$ 80

4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator.
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dokumen Renstra BPK 2020-2024 menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi BPK. Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dan Strategi BPK yang dijabarkan dalam dokumen Renstra tersebut, maka dibangun Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun skor kinerja BPK Tahun 2020 adalah sebesar 98,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3 - Indikator Kinerja BPK Tahun 2020

Sasaran Strategis/Indikator		Target	Realisasi	Capaian	Skor Kinerja
Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi					
IKU/Sub IKU					
1	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	69,93%	95,80	98,66
1.1	Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$ (Bobot 70%)		67,93%		
1.2	Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK (Bobot 15%)		-*		
1.3	Tingkat Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara (Bobot 15%)		79,28%		
2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,10 (Sangat Memuaskan)	4,18 (Sangat Memuaskan)	101,95	
3	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,42 (A)	88,12** (A)	99,66	

\* tingkat pemanfaatan pendapat dipantau atas pendapat yang diterbitkan dalam periode Renstra BPK 2020–2024

\*\* sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2020, penilaian atas Nilai QA RB belum terbit, sehingga menggunakan realisasi Tahun 2019

**Sasaran Strategis – Meningkatkan Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi**

Sasaran Strategis (SS) ini dimaksudkan agar entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/D, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian negara yang dipulihkan. Upaya-upaya BPK tersebut kemudian disertai dengan



adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi.

Untuk memastikan agar SS ini tercapai, BPK telah mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian SS ini. Beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian SS ini di antaranya sebagai berikut.

#### **1. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Berlarut-larut**

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat beberapa penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian risiko ini di antaranya:

- a. belum tersedianya pengaturan lebih lanjut atas pemberian sanksi pada pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi; dan
- b. pengklasifikasian status tindak lanjut belum mengakomodasi *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

#### **2. Entitas Tidak Dapat Memenuhi Bukti Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)**

Berdasarkan hasil identifikasi awal, penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian risiko ini adalah terjadinya wabah penyakit/pandemi (misalnya Covid-19, flu burung, penyakit menular lainnya).

#### **3. Pendapat Tidak Relevan dengan Perkembangan Program Pemerintah**

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat beberapa penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian risiko ini di antaranya:

- a. hasil pemeriksaan tidak selaras dengan perkembangan isu terkini;
- b. obyek pemeriksaan tidak selaras dengan perkembangan isu terkini;
- c. strategi pemeriksaan belum selaras dengan perkembangan program pemerintah; dan
- d. mekanisme penyusunan pendapat belum sistematis.

#### **4. Penyelesaian Kasus Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Berlarut-larut**

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat beberapa penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian risiko ini di antaranya:

- a. belum ada mekanisme penyelesaian TP/TGR di satker pemeriksaan;
- b. belum ada keseragaman perlakuan atas penanganan kasus kerugian yang dilakukan oleh bendahara yang ditemukan pada saat pemeriksaan;
- c. belum ada peraturan terkait proses penyelesaian kasus TGR pada BUMN/BUMD; dan
- d. terjadinya wabah penyakit/pandemi (misalnya Covid-19, flu burung, penyakit menular lainnya).

Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, BPK melaksanakan serangkaian rencana penanganan risiko serta berbagai kegiatan yang bersifat rutin maupun strategis. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2020, antara lain optimalisasi penerapan SPKN, PMP, PMPP,



Juklak dan Juknis Pemeriksaan serta Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif antara BPK dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan penyelesaian TLRHP, mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian TLRHP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian TLRHP yang dilakukan oleh pemerintah/entitas, melaksanakan reviu berkelanjutan atas implementasi strategi pemeriksaan agar selaras dengan program pemerintah, melaksanakan pengembangan Aplikasi SIKAD yang terintegrasi, dan mengoordinasikan langkah-langkah khusus agar penyelesaian TP/TGR dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencapaian SS dinilai melalui tiga IKU yaitu: (1) Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan; dan (3) Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi. Pencapaian SS Tahun 2020 adalah 98,66. Capaian masing-masing IKU yang mendukung SS ini dapat diuraikan sebagai berikut.

### IKU 1 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK

- *IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai  $\geq 75\%$ , tingkat pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK, dan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara.*
- *IKU ini menunjukkan dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola keuangan negara.*

Melalui pemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK oleh entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan, BPK dapat berperan aktif dalam meningkatkan dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola keuangan negara. Salah satu dampak atas hasil pemeriksaan BPK antara lain melalui adanya peningkatan atas aspek kualitas dan manfaat atas tata kelola keuangan negara yang berpengaruh dalam mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang didukung dari kesesuaian rekomendasi dengan temuan, dan aspek implementatif dalam rekomendasi.

IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan indikator kinerja yang pengukurannya baru dilakukan pada Tahun 2020 dalam Periode Renstra 2020-2024. IKU tersebut diukur dari tiga sub indikator, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$

Sub indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan entitas (baik itu kementerian/lembaga/pemda) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Indikator ini diukur

dengan membandingkan jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya telah mencapai 75% dibagi dengan total jumlah entitas.

## **2. Tingkat pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK**

Sub indikator ini merupakan cerminan atas pelaksanaan wewenang BPK dalam bentuk pemberian pendapat BPK. Pendapat BPK disusun dari hasil pemeriksaan maupun dari hasil kajian terhadap isu strategis yang memerlukan pendapat serta pertimbangan BPK. Pendapat dan/atau pertimbangan BPK dikatakan dimanfaatkan ketika dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

## **3. Tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara**

Sub indikator ini menunjukkan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara yang telah ditetapkan. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud di sini terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, non bendahara dan pejabat lainnya. Indikator ini mengukur pencapaian tingkat penyelesaian kasus TP dan TGR dari total jumlah kasus keseluruhan, baik yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK maupun yang dilaporkan oleh entitas terkait dengan kasus kerugian yang terjadi, yang perlu segera ditetapkan nilai kerugiannya oleh BPK ataupun pejabat yang berwenang lainnya.

Pada Tahun 2020, realisasi IKU ini adalah sebesar 69,93% atau mencapai 95,80% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar 73%. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil pengukuran atas dua sub indikator, yaitu: (1) realisasi persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai  $\geq 75\%$  dari Tahun 2005 adalah sebesar 67,93%, dan (2) realisasi tingkat penyelesaian TP dan TGR sebesar 79,28% dengan rincian jumlah kasus TP dan TGR yang telah selesai sebanyak 59.662 kasus dari total kasus keseluruhan sebanyak 75.253 kasus. Sedangkan sub indikator Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK belum dapat diperoleh realisasinya oleh karena mekanisme perolehan data terkait pengukuran atas sub indikator ini masih dalam proses penyempurnaan.

Rincian penjelasan capaian masing-masing sub IKU sebagai berikut.

### **1.1 Sub Indikator Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$**

Sub Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan entitas (baik itu kementerian/lembaga/pemda) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya telah mencapai 75% dibagi dengan total jumlah entitas.

Pada Tahun 2020, realisasi persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai  $\geq 75\%$  dari Tahun 2005 adalah sebesar 67,93%. Realisasi ini didapat dari rata-rata persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai  $\geq 75\%$ .

## 1.2 Sub Indikator Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK

Sub Indikator ini merupakan cerminan atas pelaksanaan wewenang BPK dalam bentuk pemberian pendapat BPK.

Pada Tahun 2020, belum dapat diperoleh realisasinya oleh karena mekanisme perolehan data terkait pengukuran atas sub indikator ini masih dalam proses penyempurnaan. Pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK akan dilakukan dengan menghitung jumlah pendapat dan atau pertimbangan BPK yang dimanfaatkan oleh entitas dibagi dengan jumlah pendapat dan/atau pertimbangan yang dikeluarkan selama periode Renstra.

## 1.3 Sub Indikator Tingkat Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Sub Indikator ini menunjukkan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara yang telah ditetapkan. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud di sini terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, non bendahara dan pejabat lainnya.

Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan baik jumlah kasus maupun jumlah penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan tingkat penyelesaian sebesar 79,28% dengan rincian jumlah kasus TP dan TGR yang telah selesai sebanyak 59.662 kasus dari total kasus keseluruhan sebanyak 75.253 kasus. Data tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020.

Oleh karena IKU 1 ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 1 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 - Perkembangan Capaian IKU 1 Periode Tahun 2018-2020

IKU 1 Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	73%
Realisasi	NA*	NA*	68,28%
Capaian	NA*	NA*	93,53%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Ketidaktercapaian indikator ini disebabkan oleh:

1. masih rendahnya realisasi sub indikator 1.1 Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai  $\geq 75\%$ , dan
2. belum terealisasinya sub indikator 1.2 Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK.

Meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan, BPK tetap berupaya untuk memperbaiki pencapaian indikator ini dengan mendorong entitas untuk lebih giat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta menyelesaikan proses penyempurnaan pengukuran sub indikator 1.2 di Tahun 2021.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 5 - Perbandingan Realisasi IKU 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	76%	79%	82%	85%	68,28%	80,33%

Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 80,33%. Diharapkan IKU ini dicapai pada Tahun 2024.

Selain berupaya mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”, BPK juga berupaya agar pencapaian sasaran strategis tersebut dilakukan dengan efisien. Beberapa **upaya efisiensi** yang dilakukan BPK dalam mencapai Sasaran Strategis antara lain melalui penyempurnaan berkelanjutan mekanisme pengukuran indikator dan proses bisnis dengan mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dan Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD). Manfaat yang diperoleh atas pengembangan SIPTL dan SIKAD tersebut antara lain berupa penghematan anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi waktu.

## IKU 2 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan

- *IKU ini bertujuan memastikan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan BPK telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.*
- *IKU ini menggambarkan atau mencerminkan tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh para pemangku kepentingan yang diukur berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.*

Pengukuran indikator terkait tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan oleh PT Wahana Data Utama melalui survei pada Tahun 2020. Responden survei tersebut adalah para pemangku kepentingan, yaitu pejabat/pihak manajemen yang berasal dari: (1) entitas yang diperiksa, yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) dan BUMN/BUMD; (2) Lembaga Perwakilan yang berasal dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten; dan (3) Instansi Penegak Hukum

(IPH), yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan hasil pemeriksaan BPK.

Tingkat kepuasan tersebut diukur melalui persepsi pemangku kepentingan atas tingkat kemampuan hasil pemeriksaan BPK dalam mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang didukung dari kesesuaian rekomendasi dengan temuan, dan aspek implementatif dalam rekomendasi. Hasil pemeriksaan BPK yang akan menjadi variabel dalam pengukuran dengan survei ini adalah produk BPK seperti IHPS, LHP, dan produk BPK lainnya.

Untuk menilai relevansi hasil pemeriksaan terhadap harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, survei dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran 1-5, sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 : sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 : tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 : memuaskan
- 4,00 – 5,00 : sangat memuaskan

Berdasarkan hasil survei, realisasi indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan adalah sebesar 4,18 (Sangat Memuaskan) atau melampaui 101,95% dari target tahunan ditetapkan sebesar 4,10 (Skala 1-5). Capaian indeks ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan BPK dalam mewujudkan tercapainya sasaran strategis yaitu meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi.

**Tabel 6 - Perkembangan Capaian IKU 2 Periode Tahun 2018-2020**

IKU 2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	4,00	4,00	4,10
Realisasi	4,17	4,12	4,18
Capaian	104,25%	103,00%	101,95%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	+0,11	-0,05	+0,06

Ketercapaian indikator ini menandakan BPK mulai proaktif dalam merespons isu-isu strategis yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Beberapa strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam proses pemeriksaan melalui percepatan penyusunan strategi komunikasi yang komprehensif baik dari sisi kelembagaan dan pemeriksaan (tim dan individu pemeriksa), dengan melakukan:
  - menyusun strategi komunikasi yang efektif;
  - menyusun *roadmap* kerjasama dengan pemangku kepentingan; dan
  - menyusun *database* pemangku kepentingan berdasarkan tujuan organisasi, pemangku kepentingan prioritas, kebutuhan dan karakteristik pemangku kepentingan.

2. Mengidentifikasi prosedur pemeriksaan alternatif sesuai dengan standar.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 - Perbandingan Realisasi IKU 2 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,18	92,89%

Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 92.89%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai setiap tahun hingga Tahun 2024.

Selain berupaya mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi” BPK juga berupaya melakukan efisiensi dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut. **Upaya efisiensi** yang dilakukan BPK adalah dengan menggunakan metodologi survei digital dan memasukkan variabel kebermanfaatan LHP dalam meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK juga mengintensifkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Akhir Survei oleh PT Wahana Data Utama Tahun 2020.

### IKU 3 – Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi

- *IKU ini menunjukkan tingkat capaian BPK dalam implementasi Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menpan Nomor 26 Tahun 2020*
- *Penilaian QA RB dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahun.*

*Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (RB) adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK. Kegiatan QA tersebut bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK telah memenuhi mutu yang disyaratkan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran tingkat pemenuhan QA RB dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahun dengan melakukan survei terhadap responden yang berasal dari internal BPK. Sesuai dengan Peraturan*

Menpan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kategori nilai QA RB Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



- AA = Istimewa (>90-100)
- A = Sangat Baik (>80-90)
- BB = Baik (>70-80)
- B = Cukup Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Buruk (>30-50)
- D = Sangat Buruk (0-30)

Pada Tahun 2020 BPK menargetkan akan memperoleh nilai QA RB sebesar 88,42 dengan kategori A (Sangat Baik). Target ini meningkat dibandingkan dengan realisasi nilai QA RB pada Tahun 2019 yaitu sebesar 88,12 dengan kategori A (Memuaskan). Sampai dengan laporan ini dilaporkan, hasil evaluasi penilaian Tahun 2020 masih belum diperoleh dari Kementerian PANRB sehingga masih menggunakan realisasi IKU Tahun 2019 tersebut yang kriteria pengukurannya masih sesuai dengan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019. Adapun perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

**Tabel 8 - Perkembangan Capaian IKU 3 Periode 2018-2020**

IKU 3 Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	AA	AA	A (88,42)
Realisasi	A	A	A (88,12)*
Capaian	90,00%	96,78%	99,66%*
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	-

\* sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2020, penilaian atas Nilai QA RB belum terbit, sehingga menggunakan realisasi Tahun 2019

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 9 berikut.

**Tabel 9 - Perbandingan Realisasi IKU 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,42 (A)	88,72 (A)	89,02 (A)	89,32 (A)	89,62 (A)	88,12* (A*)	98,33%*

\* sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2020, penilaian atas Nilai QA RB belum terbit, sehingga menggunakan realisasi Tahun 2019

Oleh karena hasil revidi QA RB Tahun 2020 oleh Kementerian PANRB belum diterima BPK dan juga dengan pertimbangan bahwa tidak ada masalah signifikan yang berpengaruh terhadap menurunnya penilaian atas akuntabilitas kinerja BPK di Tahun 2020, maka dalam rangka penyusunan laporan ini, BPK menggunakan hasil penilaian periode Tahun 2019, yaitu nilai QA RB sebesar 88,12 dengan kategori A "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan target QA RB Tahun 2024 pada Renstra BPK 2020-2024 maka pencapaian tersebut adalah sebesar 98,33%.

Dalam rangka mencapai SS "Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi" yang salah

satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan Nilai QA RB yang diperoleh dari Kementerian PANRB, maka BPK akan melakukan **upaya efisiensi** berupa perbaikan Kapasitas dan Akuntabilitas, Organisasi Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN dan Kualitas Pelayanan Publik. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi antara lain dengan melakukan sistem promosi dan mutasi yang transparan, evaluasi berkala atas aspek konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BPK, evaluasi setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan, peningkatan kompetensi pemeriksa dan pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah.

## Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 1 - Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik secara nasional maupun global.

Selama Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka perencanaan strategis, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan antara lain melalui penyusunan Renstra BPK Tahun 2020-2024, penerapan manajemen pengetahuan, diskusi manajemen risiko dengan ANAO (Australian National Audit Office), penyusunan Panduan Pemeriksaan Kepatuhan terkait penanganan Covid-19 pada masa darurat.

Strategi ini diampu oleh Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang). Pada Tahun 2020, ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 1 ini diukur atas 16 indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2020 dan menunjukkan tingkat kontribusi Ditama Revbang dalam mengintegrasikan dalam satu kesatuan utuh antara perencanaan strategis, operasional dan kinerja dengan memperhitungkan faktor risiko. Hal ini diperlukan guna menjamin ketepatan penurunan dan penyesuaian strategi BPK hingga ke level individu. Capaian Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan tersebut diukur melalui survei oleh surveyor independen dengan menghitung tingkat kepuasan dalam skala indeks kepuasan, yaitu sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan pada Tahun 2020 sebesar Sangat Memuaskan (4,14), di atas target yang ditetapkan sebesar Memuaskan (3,70), sehingga capaiannya sebesar 111,89%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 1 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

**Tabel 10 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 1 Tahun 2018-2020**

IKU 1 Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	Memuaskan (3,70)
Realisasi	NA*	NA*	Sangat Memuaskan (4,14)
Capaian	NA*	NA*	111,89%.
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 11 berikut.

**Tabel 11 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan	Memuaskan (3,70)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (4,00)	Sangat Memuaskan (4,14)	103,50%

Tabel 11 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 103,50%. Diharapkan IKU ini dapat dipertahankan capaiannya hingga Tahun 2024.

## 2. Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2020 dan menunjukkan pengukuran atas upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini diukur dengan menilai tingkat kematangan manajemen pengetahuan melalui *self assesment*. Capaian Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan tersebut diukur berdasarkan melalui *self assesment* dalam lima level, yaitu *Initiate* (level 1), *Develop* (level 2), *Standardize* (level 3), *Optimize* (level 4), *Innovate* (level 5).

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2020 sebesar *Standardize* (level 3), sesuai target yang ditetapkan sebesar *Standardize* (level 3), sehingga capaiannya sebesar 100%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 2 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 1 Tahun 2018-2020

IKU 2 Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	<i>Standardize</i> (level 3)
Realisasi	NA*	NA*	<i>Standardize</i> (level 3)
Capaian	NA*	NA*	100%.
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan	<i>Standardize</i> (Level 3) [3,0]	<i>Optimize</i> (Level 4) [4,0]	<i>Optimize</i> (Level 4) [4,0]	<i>Optimize</i> (Level 4) [4,0]	<i>Innovate</i> (Level 5) [5,0]	<i>Standardize</i> (Level 3) (3,0)	60%

Tabel 13 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 60%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya sampai dengan Tahun 2024.

### 3. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2020 dan menunjukkan pengukuran tingkat kematangan dari penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari proses *monitoring and control*. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui posisi organisasi, apakah proses yang dijalankan telah sesuai dengan yang direncanakan. Indikator ini diukur dengan *self assesment*. Capaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko diukur berdasarkan *self assesment* dalam lima level, yaitu *adhoc* (level 1), *preliminary* (level 2), *defined* (level 3), *integrated* (level 4), *optimized* (level 5).

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2020 sebesar 2,95, di bawah target yang ditetapkan sebesar *Defined* (Level 3), sehingga capaiannya sebesar 98,33%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 3 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 1 Tahun 2018-2020

IKU 3 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	<i>Defined</i> (Level3) / [3]
Realisasi	NA*	NA*	2,95
Capaian	NA*	NA*	98,33%.
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	<i>Defined</i> (Level 3) [3,0]	<i>Defined</i> (Level 3) [3,0]	<i>Defined</i> (Level 3) [3,0]	<i>Integrated</i> (Level 4) [4,0]	<i>Optimized</i> (Level 5) [5,0]	2,95	59%

Tabel 15 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 59%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

#### 4. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2020 dan mengukur suatu pengelolaan perubahan yang terstruktur dan sistematis atas Implementasi Inisiatif Strategi Renstra BPK 2020-2024 dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan oleh individu maupun organisasi. Indikator ini diukur melalui survei/*self assessment* dalam lima level yaitu *adhoc/absent* (level 1), *isolated projects* (level 2), *multiple projects* (level 3), *organizational standards* (level 4), dan *organizational competency* (level 5).

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengubahan pada Tahun 2020 belum direalisasikan karena belum ditetapkannya Inisiatif Strategis sebagai bagian dari Implementasi Renstra BPK 2020-2024 dan diproyeksikan akan diukur pada Tahun 2021. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

**Tabel 16 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 1 Tahun 2018-2020**

IKU 4 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengubahan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	NA*
Realisasi	NA*	NA*	NA*
Capaian	NA*	NA*	NA*
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	NA*

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 17 berikut.

**Tabel 17 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengubahan	<i>Multiple projects</i> (Level 3)	<i>Multiple projects</i> (Level 3)	<i>Multiple projects</i> (Level 3)	<i>Organizational standards</i> (Level 4)	<i>Organizational competency</i> (Level 5)	NA	NA

Tabel 17 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengubahan terhadap target Tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena akan diproyeksikan pengukurannya pada Tahun 2021. Diharapkan target IKU ini dapat selalu dicapai setiap tahun hingga Tahun 2024.

## 5. Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2020 dan menunjukkan kemampuan Ditama Revbang dalam menyiapkan konsep pendapat yang dapat digunakan oleh Badan. Capaian tersebut diukur berdasarkan jumlah pendapat yang disampaikan dan disetujui Badan dibandingkan dengan jumlah pendapat yang direncanakan.

Pada Tahun 2020, Ditama Revbang menghasilkan satu Konsep Pendapat BPK sedangkan dalam target ditetapkan sebanyak satu Konsep Pendapat BPK. Dengan demikian, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK pada Tahun 2020 adalah sebesar 100% dan sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 5 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Indikator ini berbeda dalam formulasinya, semula berupa jumlah pendapat berubah menjadi persentase



pemenuhan pendapat. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 1 Tahun 2018-2020

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	100%
Realisasi	NA*	NA*	100%
Capaian	NA*	NA*	100%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 19 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan IKU ini dapat dipertahankan capaiannya hingga Tahun 2024.

## 6. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP

Indikator ini menunjukkan kualitas dan ketermanfaatan IHP berdasarkan persepsi pemangku kepentingan. Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP diukur melalui survei oleh surveyor independen dengan menghitung tingkat kepuasan dalam skala indeks kepuasan, yaitu:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan pengukuran, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP pada Tahun 2020 bernilai Sangat Memuaskan (4,15), di atas target yang ditetapkan sebesar Sangat Memuaskan (4,10), sehingga capaiannya sebesar 101,22%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan kualitas IHP. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 1 Tahun 2018-2020

IKU 6 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	Memuaskan (3,90)	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,10)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,06)	Sangat Memuaskan (4,09)	Sangat Memuaskan (4,15)
Capaian	104,10%	99,76%	101,22%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	+0,03	+0,06

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP	Sangat memuaskan (4,1)	Sangat memuaskan (4,2)	Sangat memuaskan (4,2)	Sangat memuaskan (4,3)	Sangat memuaskan (4,3)	Sangat memuaskan (4,15)	96,51%

Tabel 21 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 96,51%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

## 7. Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP

Indikator ini menunjukkan pengukuran tingkat pemenuhan terhadap permintaan pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan atau Rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Daerah. Capaian Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP diukur dengan menghitung jumlah pertimbangan SAP dan SPIP yang dipenuhi, dibandingkan dengan jumlah pertimbangan SAP dan SPIP yang diminta/direncanakan.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP pada Tahun 2020 sebesar 100%, sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 masih sama dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 1 Tahun 2018-2020

IKU 7 Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	-

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 23 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Diharapkan IKU ini dapat dipertahankan capaiannya sampai dengan Tahun 2024.

## 8. Indeks Mutu Organisasi

Indikator ini menunjukkan pengukuran persepsi pemangku kepentingan atas mutu organisasi dan ketatalaksanaan. Capaian Indikator Mutu Organisasi diukur melalui survei oleh surveyor independen dengan menghitung tingkat kepuasan dalam skala indeks kepuasan, yaitu sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan pengukuran, Indeks Mutu Organisasi pada Tahun 2020 sebesar Sangat Memuaskan (4,10), di atas target yang ditetapkan sebesar level Memuaskan (3,90), sehingga capaiannya sebesar 105,12%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan dalam hal dukungan kelembagaan. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 1 Tahun 2018-2020

IKU 8 Indeks Mutu Organisasi	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,90)
Realisasi	Memuaskan (3,93)	Memuaskan (3,96)	Sangat Memuaskan (4,10)
Capaian	103,42%	104,21%	105,12%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	+0,03	+0,14

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25 - Perbandingan Realisasi IKU 8 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Mutu Organisasi	Memuaskan (3,9)	Memuaskan (3,9)	Memuaskan (3,95)	Memuaskan (3,95)	Sangat Memuaskan (4,0)	Sangat Memuaskan (4,10)	102,50%

Tabel 25 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Mutu Organisasi terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 102,50%. Diharapkan IKU ini dapat dipertahankan capaiannya setiap tahun hingga berakhirnya Renstra pada Tahun 2024.

## 9. Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2020 dan mengukur sejauh mana perangkat lunak yang dihasilkan dapat diterapkan. Capaian Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan diukur berdasarkan survei dengan menghitung tingkat keterterapan, yaitu sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = tidak dapat diterapkan
- 2,00 - 2,99 = sulit diterapkan
- 3,00 - 3,99 = dapat diterapkan
- 4,00 - 5,00 = mudah diterapkan

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan pada Tahun 2020 sebesar 4,08 (Mudah Diterapkan), di atas target yang ditetapkan sebesar 4,0 (Mudah Diterapkan), sehingga capaiannya sebesar 102%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 9 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 26 berikut.

Tabel 26 - Perkembangan Capaian IKU 9 Strategi 1 Tahun 2018-2020

IKU 9 Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	Mudah Diterapkan (4,0)
Realisasi	NA*	NA*	Mudah Diterapkan (4,08)
Capaian	NA*	NA*	102%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan dalam Tabel 27 berikut.

Tabel 27 - Perbandingan Realisasi IKU 9 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan	Mudah diterapkan (4,0)	Mudah diterapkan (4,1)	Mudah diterapkan (4,1)	Mudah diterapkan (4,2)	Mudah diterapkan (4,2)	Mudah diterapkan (4,08)	97,14%

Tabel 27 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 97,14%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

## 10. Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK

IKU Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan IKU baru di Tahun 2020 dan pengukuran kualitas hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Capaian Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK diukur dengan menghitung kualitas pelaporan pemeriksaan BPK yang meliputi akurasi, konsisten, kesesuaian terhadap pedoman.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun 2020 sebesar 73,19%, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 73,19%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 10 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 28 berikut.

Tabel 28 - Perkembangan Capaian IKU 10 Strategi 1 Tahun 2018-2020

IKU 10 Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	100%
Realisasi	NA*	NA*	73,19%
Capaian	NA*	NA*	73,19%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29 - Perbandingan Realisasi IKU 10 Strategi 1 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	73,19%	73,19%

Tabel 29 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 73,19%. Diharapkan capaian IKU ini dapat ditingkatkan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

## 11. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Ditama Revbang juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 1 “Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis” yang diukur keberhasilannya melalui 16 indikator di atas, upaya efisiensi yang dilakukan di antaranya pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko menggunakan metode *self assesment* dan BPK melakukan rapat internal dan eksternal melalui *video conference*. Misalnya, BPK dan Australian National Audit Office (ANAO) melakukan *knowledge sharing* manajemen risiko melalui *video conference*. Hal tersebut berdampak pada penghematan anggaran.



## Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

BPK berupaya mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memerhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memerhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memerhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan memerhatikan unsur tersebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Selama Tahun 2020, BPK telah menerapkan strategi pemeriksaan ini dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK, antara lain sebagai berikut.

1. Penerapan strategi dan alokasi sumber daya yang memadai agar antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada saat pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat (pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan serta pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik).
2. Penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/D dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut.
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan investigatif yang didukung dengan peningkatan sinergi antara BPK dengan IPH dalam merespons seluruh permintaan pemeriksaan, serta menentukan prioritas permintaan pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan signifikansi dampak, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan mandat BPK.
4. Peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan melalui komitmen dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), keakuratan *database* TLRHP, pemanfaatan aplikasi yang terkait, pedoman dan/atau panduan yang mendukung pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, penyempurnaan mekanisme pengelolaan laporan hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia kepada lembaga perwakilan, integrasi sistem informasi BPK, dan pengembangan budaya organisasi.

5. Peningkatan pemanfaatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pemeriksaan Keuangan dan evaluasi secara berkelanjutan atas persyaratan KAP terdaftar di BPK untuk penjaminan mutu.
6. Penyusunan manajemen pemeriksaan untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan keselarasan antara rencana pemeriksaan dengan kesimpulan yang dihasilkan.

Strategi ini diampu oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Auditorat Utama Investigasi (AUI), serta Staf Ahli. Pada Tahun 2020, ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 2 ini diukur atas sebelas indikator kinerja yang telah ditetapkan targetnya.

Capaian masing-masing IKU dari setiap Unit Kerja yang mendukung Strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

## AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang terdiri dari AKN I sampai dengan AKN VII yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian/Lembaga Pemerintah serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing AKN dalam rangka mendukung capaian Strategi 2, ditetapkan sebelas IKU yang diukur capaiannya pada Tahun 2020, sebagai berikut.

### 1. Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020. Pada periode Renstra BPK 2016-2019, IKU Tingkat Implementasi Strategi mengukur kesesuaian rencana pemeriksaan yang ada dalam dokumen perencanaan anggaran dengan kebijakan pemeriksaan yang dituangkan dalam Renstra BPK 2016-2019 serta kesesuaian antara tujuan audit (*audit objective*) yang dinyatakan dalam program pemeriksaan dengan *Tentative Strategic Audit Objective* (TSAO) yang tertuang dalam kerangka acuan kerja atas tema dan fokus pemeriksaan, sebagai turunan dari dokumen Renstra BPK.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan pada Tahun 2020 sebesar 132,56%, di atas target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 132,56%.

Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi pemeriksaan tematik nasional/lokal sebanyak 215 pemeriksaan dibandingkan 215 rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal ditambahkan dengan alokasi skor 32,56 yang berasal dari partisipasi 48 Satuan Kerja di Lingkungan AKN I sampai dengan AKN VII.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 1 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 30 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 pada Lingkup AKN Tahun 2018-2020**

IKU 1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	100%
Realisasi	NA*	NA*	132,56%
Capaian	NA*	NA*	132,56%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 31 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 pada Lingkup AKN terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	132,56%	132,56%

Tabel 31 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 132,56%.

## 2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian/lembaga/pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Berdasarkan pengukuran, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2020 sebesar 76,48% di atas target yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga capaiannya sebesar 101,97%.

Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 450.554 rekomendasi ditambah jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 6.075 rekomendasi, dari total 597.088 rekomendasi yang disampaikan kepada *auditee* selama periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2020.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan dukungan komitmen dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat pemanfaatan teknologi informasi dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL). Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 32 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 pada Lingkup AKN Tahun 2018-2020**

IKU 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	65%	75%	75%
Realisasi	63,44%*	75,14%	76,48%
Capaian	97,60%	100,18%	101,97%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	+11,70	+1,34

\*realisasi merupakan pemantauan rekomendasi periode Tahun 2014-2018

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 33 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 2 pada Lingkup AKN terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	76,48%	101,97%

Tabel 33 menunjukkan bahwa realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 101,97%.

### 3. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2020 sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dibandingkan dengan seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa di Lingkungan AKN I sampai dengan AKN VII. Selama Tahun 2020, terdapat 36 permintaan yang diajukan para pemangku kepentingan, dan seluruhnya telah dipenuhi dan diterbitkan laporannya dengan AUI sebagai koordinatornya.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 sama jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan pemeriksaan BPK bersifat responsif atau lebih tanggap dalam menangkap isu strategis dan permintaan pemangku kepentingan. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 34 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 pada Lingkup AKN Tahun 2018-2020**

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	-	-

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 35 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 pada Lingkup AKN terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 35 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Untuk ke depannya, BPK akan lebih responsif dalam menangkap isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dan permintaan investigasi dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

#### 4. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality*

*Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal Satuan Kerja melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020. Pada periode Renstra 2016—2019, Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan hanya diukur dari pemenuhan QA dan QC Satuan Kerja.

Berdasarkan pengukuran, Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Tahun 2020 sebesar 78,16%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 78,16%. Capaian tersebut diukur berdasarkan hasil QA dan QC Satuan Kerja di Lingkungan AKN I sampai dengan AKN VII, hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan di Lingkungan AKN I sampai dengan AKN VII, serta hasil reviu Itama terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 6 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 36 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 2 pada Lingkup AKN Tahun 2018-2020**

IKU 6 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	100%
Realisasi	NA*	NA*	78,16%
Capaian	NA*	NA*	78,16%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 37 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 2 pada Lingkup AKN terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	78,16%	78,16%

Tabel 37 menunjukkan bahwa realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 78,16%. Diharapkan target IKU ini dapat terpenuhi pada Tahun 2024.



## 5. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja AKN juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

### AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI

#### 1. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan instansi penegak hukum. Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2020 adalah sebesar 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa BPK melalui Auditorat Utama Investigasi (AUI) telah memenuhi seluruh permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Sampai Tahun 2020, dari 36 permintaan pemeriksaan yang diajukan pemangku kepentingan, seluruhnya telah dipenuhi dan diterbitkan laporannya.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 masih sama dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian baik tersebut terutama didukung oleh koordinasi aktif yang dilakukan AUI dengan instansi penegak hukum yang membuat pemenuhan data dukung terkait pemeriksaan dapat dilakukan secara efisien sehingga mempercepat jalannya proses pemeriksaan. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 AUI Tahun 2018-2020

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan para Pemangku Kepentingan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	-

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 apabila diproyeksikan terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 39 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 AUI terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 39 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 sudah tercapai sebesar 100%. Diharapkan capaian baik IKU ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

## 2. Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi

Indikator ini menunjukkan intensitas pemanfaatan hasil investigasi oleh instansi penegak hukum. Hasil investigasi tersebut terdiri dari Hasil Pemeriksaan Investigasi (PI), Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 90,74% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 80% sehingga capaiannya adalah sebesar 113,43%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa hasil investigasi BPK telah dimanfaatkan secara optimal oleh instansi penegak hukum.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan jumlah permintaan yang meningkat pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 36 permintaan pemeriksaan dari tahun sebelumnya sebanyak empat permintaan pemeriksaan. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 40 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 AUI Tahun 2018-2020**

IKU 3 Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	40%	80%	80%
Realisasi	97,04%	92,53%	90,74%
Capaian	242,60%	115,66%	113,43%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-4,51%	-1,79%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 apabila diproyeksikan terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 41 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 AUI terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi	80%	85%	90%	95%	100%	90,74%	90,74%

Tabel 41 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai 90,74%. Diharapkan capaian baik IKU ini dapat ditingkatkan sehingga target Tahun 2024 dapat dicapai di akhir tahun Renstra BPK 2020-2024.

### 3. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik Pemeriksa, dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) melalui pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Tahun 2020 adalah sebesar 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa seluruh pemeriksaan yang diselesaikan oleh BPK melalui AUI telah sesuai dengan standar mutu yang ada di BPK.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 masih sama dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian baik tersebut terutama didukung oleh komitmen dari Pejabat Struktural Pemeriksaan maupun Pejabat Fungsional Pemeriksaan dalam melaksanakan proses pengendalian mutu di setiap tahapan pemeriksaan. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 42 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 AUI Tahun 2018-2020**

IKU 4 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	-

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 apabila diproyeksikan terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 43 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 2 AUI terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 43 menunjukkan bahwa realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 sudah tercapai sebesar 100%. Diharapkan capaian baik IKU ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

### 4. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja AUI juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

## STAF AHLI

### 1. Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kajian yang dibuat Staf Ahli baik jumlah maupun kesesuaian topik dengan bidang tugas. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah kajian yang disusun oleh Staf Ahli dengan target penyusunan kajian dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai/melebihi target yang ditentukan di Tahun 2020 sebanyak dua kajian. Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada Tabel 44 berikut.

**Tabel 44 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020**

IKU 1 Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas		Tahun		
		2018*	2019	2020
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	100%	1	2
	Realisasi	0%	0	8
	Capaian	0%	0%	400%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	NA*	+8
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	100%	2	2
	Realisasi	200%	2	2
	Capaian	200%	100%	100%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	NA*	0
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	100%	2	2
	Realisasi	100%	3	2
	Capaian	100%	150%	100%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	NA*	-1
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	100%	2	2
	Realisasi	0%	4	3
	Capaian	0%	200%	150%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	NA*	-1
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	100%	2	2
	Realisasi	100%	3	7
	Capaian	100%	150%	350%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	NA*	+4

\*Tahun 2018 nomenklatur IKU ini adalah "Tingkat Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas"

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 45.

Tabel 45 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 1 Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	2	3	3	4	4	8	200%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	2	3	3	4	4	2	50%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	2	3	3	4	4	2	50%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	2	3	3	4	4	3	75%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	2	3	3	4	4	7	175%

Tabel 45 menunjukkan bahwa sebagian realisasi IKU Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas di lingkungan Staf Ahli Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah mencapai atau bahkan melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Sedangkan untuk yang belum mencapai target, diharapkan dapat ditingkatkan sehingga target Tahun 2024 dapat dicapai di akhir tahun Renstra BPK 2020-2024.

## 2. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop* sebagai Peserta

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kompetensi melalui peran serta staf ahli sebagai peserta dalam seminar/*workshop*. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah jam pelatihan (JP) dalam seminar/*workshop* yang diikuti oleh Staf Ahli sebagai peserta dengan JP yang ditargetkan dalam satu tahun.

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai/melebihi target yang ditentukan di Tahun 2020 sebanyak 40 JP. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop* sebagai Peserta pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta		Tahun		
		2018*	2019	2020
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	6	40	40
	Realisasi	0	0	49
	Capaian	0%	0%	122,50%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	0	+49

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta		Tahun		
		2018*	2019	2020
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	9	40	40
	Realisasi	21	116	55
	Capaian	233,33%	290%	137,50%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	+95	-61
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	9	40	40
	Realisasi	25	150	52
	Capaian	277,78%	375%	130%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	+125	-98
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	9	40	40
	Realisasi	2	180	117
	Capaian	22,22%	450%	292,50%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	+178	-63
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	6	40	40
	Realisasi	21	197	55
	Capaian	350%	492,5%	137,50%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	+176	+142

\*Tahun 2018 nomenklatur IKU ini adalah "Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop*"

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 seperti disajikan pada Tabel 47 berikut.

Tabel 47 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	49 JP	122,50%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	55 JP	137,50%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	52 JP	130%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	117 JP	292,50%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	55 JP	137,50%



Tabel 47 menunjukkan bahwa seluruh realisasi IKU Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ *Workshop* sebagai Peserta di lingkungan Staf Ahli Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

### 3. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ *Workshop*/FGD sebagai Narasumber

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kompetensi melalui peran serta staf ahli sebagai narasumber dalam seminar/ *workshop*/FGD. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah hari partisipasi Staf Ahli dalam seminar/ *workshop*/FGD sebagai narasumber dengan target yang ditetapkan dalam satu tahun.

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai/melebihi target yang ditentukan di Tahun 2020 sebanyak sepuluh hari. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ *Workshop*/FGD sebagai Narasumber pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada Tabel 48.

Tabel 48 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020

IKU 3 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Narasumber		Tahun		
		2018*	2019	2020
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	NA*	10 hari	10 hari
	Realisasi	NA*	0 hari	29 hari
	Capaian	NA*	0%	290%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	+29 hari
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	NA*	10 hari	10 hari
	Realisasi	NA*	21 hari	14 hari
	Capaian	NA*	210%	140%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	-7 hari
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	NA*	10 hari	10 hari
	Realisasi	NA*	11 hari	23 hari
	Capaian	NA*	110%	230%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	+12 hari
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	NA*	10 hari	10 hari
	Realisasi	NA*	25 hari	23 hari
	Capaian	NA*	250%	230%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	-2 hari
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	NA*	10 hari	10 hari
	Realisasi	NA*	22 hari	12 hari
	Capaian	NA*	220%	120%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	-10 hari

\*merupakan IKU yang baru ditambahkan pada Tahun 2019

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 49 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 3 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/Workshop/FGD sebagai Narasumber	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	29 hari	193,33%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	14 hari	93,33%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	23 hari	153,33%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	23 hari	153,33%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari	12 hari	80%

Tabel 49 menunjukkan bahwa hampir seluruh realisasi IKU Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/Workshop/FGD sebagai Narasumber di lingkungan Staf Ahli Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Sedangkan untuk yang belum mencapai target, diharapkan dapat ditingkatkan sehingga target Tahun 2024 dapat dicapai di akhir tahun Renstra BPK 2020-2024.

#### 4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja

Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja bertujuan untuk mendorong Staf Ahli menyelesaikan laporan kegiatan dan anggaran secara tepat waktu. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah laporan kinerja tahunan, jumlah laporan kinerja triwulanan, dan jumlah laporan *output* yang disampaikan tepat waktu dan dibandingkan dengan target dalam satu tahun.

Berdasarkan pengukuran, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja seluruh Staf Ahli pada Tahun 2020 sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja seluruh Staf Ahli disajikan pada Tabel 50.

Tabel 50 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020

IKU 4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja		Tahun		
		2018	2019	2020
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	0%	0%

IKU 4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja		Tahun		
		2018	2019	2020
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	0%	0%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	0%	0%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	0%	0%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	0%	0%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 51.

**Tabel 51 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU 4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 51 menunjukkan bahwa seluruh realisasi IKU Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja di lingkungan Staf Ahli Tahun 2020 terhadap target Tahun

2024 telah mencapai target Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

## 5. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Indikator Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur tingkat kinerja anggaran dari aspek implementasi. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tersebut diukur berdasarkan empat indikator yaitu penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi.

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai/melebihi target yang ditentukan di Tahun 2020 sebesar 83%. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada Tabel 52.

**Tabel 52 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli Tahun 2018-2020**

IKU 5 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran		Tahun		
		2018	2019	2020
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	85%	83%	83%
	Realisasi	13,37%	33,15%	85,77%
	Capaian	15,73%	39,94%	103,34%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	19,78%	52,62%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	85%	83%	83%
	Realisasi	86,25%	83,25%	96,36%
	Capaian	101,47%	100,30%	116,10%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-3,00%	13,11%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	85%	83%	83%
	Realisasi	88,60%	88,75%	85,48%
	Capaian	104,24%	106,93%	120,48%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	0,15%	-3,27%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	85%	83%	83%
	Realisasi	15,49%	85,03%	86,40%
	Capaian	18,22%	102,45%	104,10%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	69,54%	1,37%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	85%	83%	83%
	Realisasi	83,71%	84,67%	83,49%
	Capaian	98,48%	102,01%	100,59%
	Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	0,96%	-1,18%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 53.

**Tabel 53 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU 5 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	85,77%	100,08%
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	96,36%	112,44%
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	85,48%	99,74%
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	86,40%	100,82%
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	83,49%	97,42%

Tabel 53 menunjukkan bahwa hampir seluruh realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di lingkungan Staf Ahli Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Sedangkan untuk yang belum mencapai target, diharapkan dapat ditingkatkan sehingga target Tahun 2024 dapat dicapai di akhir tahun Renstra BPK 2020-2024.

Dalam rangka mencapai Strategi 2 “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif” yang diukur keberhasilannya melalui sepuluh indikator di atas, **upaya efisiensi** yang dilakukan oleh BPK adalah sebagai berikut.

1. Seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, baik itu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun PDDT, untuk ke depannya akan meningkatkan cakupan pemanfaatan *Big Data Analytics* (BDA). Pemanfaatan BDA akan diukur sebagai salah satu indikator yang mendukung keberhasilan capaian Strategi 2.
2. Efektivitas pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan negara. Upaya peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan perlu juga dilakukan melalui pemeriksaan atas tindak lanjut. Upaya ini diharapkan mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, mengidentifikasi permasalahan proses tindak lanjut, dan menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa.

## Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Melalui Strategi 3 “Meningkatkan Efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara”, BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan dan kelembagaan bagi seluruh satker di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK. Strategi 3 ini diampu oleh Inspektorat Utama (Itama).

Selama Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, antara lain sebagai berikut.

1. Menginisiasi pengembangan budaya kerja satker di lingkungan BPK melalui serangkaian *workshop* dan pendampingan penyusunan, implementasi dan evaluasi budaya kerja. Itama melalui Inspektorat PI menjadi koordinator pengelola Program Inisiatif Strategis (IS) Sistem Manajemen Integritas pada periode Renstra BPK 2020-2024. Dengan pelaksanaan IS ini, diharapkan dapat mencegah pelanggaran integritas serta memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kelembagaan BPK telah dikelola sesuai nilai-nilai dasar BPK.
2. Pelaksanaan proses bisnis berbasis digital melalui implementasi Aplikasi WASMA (Pengawasan Itama) dalam monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu. Tahun 2020 menjadi tahun pertama penerapan Aplikasi WASMA. Melalui aplikasi ini, penginputan tindak lanjut dan pengiriman dokumen oleh satker serta penelaahan dan penetapan tindak lanjut oleh Itama dilakukan berjenjang melalui aplikasi sehingga diharapkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu dapat lebih efektif dan efisien.

Pada Tahun 2020, ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 3 diukur berdasarkan pencapaian atas 12 IKU. Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi 3 dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Tingkat Kematangan SPI

Indikator Tingkat Kematangan SPI merupakan IKU baru di Tahun 2020. Indikator ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPI BPK dalam mencapai tujuan pengendalian *intern* sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 23 Tahun 2011 tentang SPI BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelenggaraan SPI melalui penerapan unsur-unsur SPI yang terdiri dari *control environment, risk assessment, control activities, communication and information, dan monitoring*. Capaian Indikator Tingkat Kematangan SPI diukur melalui hasil QA Maturitas BPK oleh BPKP dengan skala sebagai berikut.

- Level 0: Belum ada kebijakan dan prosedur
- Level 1: Rintisan
- Level 2: Berkembang
- Level 3: Terdefinisi



- Level 4: Terkelola dan terukur
- Level 5: Optimum

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kematangan SPI BPK pada Tahun 2020 berada pada level 3 (skor 3,43), di atas target yang ditetapkan yaitu level 3 (skor 3,40), sehingga capaiannya sebesar 100,88%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 1 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 54.

**Tabel 54 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 3 Tahun 2018-2020**

IKU 1 Tingkat Kematangan SPI	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	Level 3 (3,40)
Realisasi	NA*	NA*	Level 3 (3,43)
Capaian	NA*	NA*	100,88%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020—2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020—2024 disajikan pada Tabel 55 berikut.

**Tabel 55 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020—2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kematangan SPI	Level 3 (3,40)	Level 4 (3,70)	Level 4 (3,70)	Level 4 (4,00)	Level 4 (4,00)	Level 3 (3,43)	85,75%

Tabel 55 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kematangan SPI Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 85,75%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

## 2. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal

Indikator ini mengukur persepsi para pemangku kepentingan internal atas efektivitas pengawasan yang dilakukan Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama agar melaksanakan kegiatan reviu yang berkualitas, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh satker yang direviu. Capaian Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal diukur melalui hasil survei oleh surveyor independen dengan skala sebagai berikut:

- 1,00-1,99: sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99: tidak memuaskan
- 3,00-3,99: memuaskan
- 4,00-5,00: sangat memuaskan

Berdasarkan pengukuran, Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal pada Tahun 2020 berada pada level Sangat Memuaskan (4,20), di atas target yang ditetapkan yaitu level Sangat Memuaskan (4,10), sehingga capaiannya sebesar 102,44%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen dari Itama untuk terus meningkatkan kompetensi pengawas internal dan komunikasi dengan satker yang direviu. Komunikasi yang baik dengan satker yang direviu dapat mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut dan perbaikan kinerja terkait rekomendasi hasil reviu. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 56.

**Tabel 56 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 3 Tahun 2018-2020**

IKU 2 Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	3,80	3,90	Sangat Memuaskan (4,10)
Realisasi	3,83	4,05	Sangat Memuaskan (4,20)
Capaian	100,79	103,85%	102,44%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA	+0,22	+0,15

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 sebagai berikut.

**Tabel 57 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Sangat Memuaskan (4,1)	Sangat Memuaskan (4,2)	Sangat Memuaskan (4,3)	Sangat Memuaskan (4,4)	Sangat Memuaskan (4,5)	Sangat Memuaskan (4,2)	93,33%

Tabel 57 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 93,33%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

### 3. Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM

Indikator ini mengukur persentase satker BPK yang memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) berdasarkan hasil reviu tim Kementerian PAN dan RB. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker-satker di BPK untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Capaian Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM tersebut diukur dengan membandingkan jumlah satker yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dengan jumlah satker yang direncanakan mendapat predikat WBK/WBBM. Pada Tahun 2020, terdapat perubahan formula untuk mengukur Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah

Berpredikat WBK/WBBM sehingga nilai yang dicapai pada Tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM pada Tahun 2020 sebesar 133% (4 satker), di atas target yang ditetapkan sebesar 100% (3 satker), sehingga capaiannya sebesar 133%. Secara rinci, capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 58 berikut.

**Tabel 58 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 3 Tahun 2018-2020**

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	12	15	100% (3 satker)
Realisasi	12	16	133% (4 satker)
Capaian	100%	106,67%	133%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	+4	NA

\*realisasi Tahun 2018-2019 merupakan jumlah akumulasi satker yang meraih predikat WBK dari Tahun 2015

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 disajikan pada Tabel 59.

**Tabel 59 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM	100% (3 satker)	100% (3 satker)	100% (3 satker)	100 (3 satker)	100% (3 satker)	133% (4 satker)	133%

Tabel 59 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM pada Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 133%.

#### 4. Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin

Indikator ini mengukur simpulan hasil pemeriksaan dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik. Indikator ini bertujuan untuk menilai upaya Inspektorat Utama (dhi. Inspektorat PI) dalam meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik. Capaian Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin diukur melalui dua Sub IKU, yaitu: 1) kesesuaian antara simpulan dalam LHP Utama atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin dengan putusan MKKE, dan 2) kesesuaian antara jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik yang dilaksanakan dengan jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik yang direncanakan.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin pada Tahun 2020 sebesar 300%, di atas target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 300%. Capaian ini jauh melebihi target karena atas Sub IKU 2 yaitu Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai telah dilaksanakan jauh melebihi target yaitu 12 kegiatan terlaksana dari dua kegiatan yang direncanakan. Selama masa pandemi, kegiatan-kegiatan sosialisasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka dilaksanakan melalui media daring sehingga dapat lebih sering diadakan mengingat persiapannya pun lebih sederhana dibandingkan kegiatan sosialisasi secara tatap muka. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 60.

**Tabel 60 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 3 Tahun 2018-2020**

IKU 4 Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	300%
Capaian	100%	100%	300%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	NA

\*Realisasi Tahun 2018–2019 merupakan capaian atas masing-masing satker

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024 disajikan pada Tabel 61 berikut.

**Tabel 61 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Tabel 61 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin pada Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 300%.

## 5. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal

Indikator ini mengukur intensitas satker pemeriksaan di BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan revidu pengendalian mutu pemeriksaan oleh Inspektorat PKMP dan mutu kelembagaan oleh Inspektorat PIMK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama dalam percepatan pengimplementasian rekomendasi hasil pengawasan Itama. Capaian Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil revidu yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi hasil revidu yang harus ditindaklanjuti.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada Tahun 2020 sebesar 84,60%, di bawah target yang ditetapkan

sebesar 95%, sehingga capaiannya sebesar 89,05%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena pada Tahun 2020, untuk pertama kalinya proses PTLRHP dilaksanakan melalui Aplikasi WASMA. Dalam proses awal pelaksanaannya ini, terdapat kendala berupa adanya kekurangpahaman satker serta permasalahan terkait jaringan. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 62.

Tabel 62 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 3 Tahun 2018-2020

IKU 5 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	Tahun				
	2018		2019		2020
	Pemeriksaan	Kelembagaan	Pemeriksaan	Kelembagaan	
Target	90,00%	87,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Realisasi	97,91%	94,60%	99,21%	92,67%	84,60%
Capaian	108,79%	108,74%	104,43%	97,55%	89,05%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	+1,30	-1,93	-

\*Realisasi Tahun 2018–2019 atas Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Reviu Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Reviu Pengendalian Mutu Kelembagaan pada IKU merupakan IKU yang terpisah

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 63.

Tabel 63 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	100,00%	84,60%	84,60%

Tabel 63 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 84,60%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

## 6. Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM (*Internal Audit Capability Model*) Level 4

Indikator Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM merupakan IKU baru pada Tahun 2020 dan mengukur pemenuhan kriteria pada enam *Key Process Area* (KPA) IACM Level 4 untuk mendukung upaya penguatan fungsi pengawasan internal BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama agar dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan internal. Adapun enam KPA IACM tersebut meliputi *Service and Role of Internal Auditing, People Management, Profesional Practices, Performance Management*

& *Accountability, Organizational Relationship and Cultures*, dan *Governance Structures*. IACM sendiri merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan internal sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu sebagai berikut.

- Level 1 – *Initial* = tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu
- Level 2 – *Infrastructure* = prosedur dan praktik audit internal berulang dan berkelanjutan
- Level 3 – *Integrated* = praktik profesional dan manajemen audit internal diterapkan secara seragam
- Level 4 – *Managed* = audit internal mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko
- Level 5 – *Optimizing* = audit internal belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan berkelanjutan

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM pada Tahun 2020 sebesar 40%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 40%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 64.

**Tabel 64 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 3 Tahun 2018-2020**

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	40%
Realisasi	NA*	NA*	40%
Capaian	NA*	NA*	100%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 65 berikut.

**Tabel 65 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 3 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4	40%	60%	100%	100%	100%	40%	40%

Tabel 65 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4 pada Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 40%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

## 7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Itama juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 3 “Meningkatkan Efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara” yang diukur keberhasilannya melalui dua belas indikator di atas, **upaya efisiensi** yang telah dilakukan oleh Itama adalah sebagai berikut.

1. Bekerja sama dengan Badan Diklat BPK terkait pelaksanaan diklat mandiri yang sesuai dengan kebutuhan pegawai dan dapat diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup Itama secara daring.
2. Merevisi anggaran sehubungan dengan pandemi Covid-19 terutama yang berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas serta belanja bahan (jamuan rapat) yang diperkirakan tidak dapat direalisasikan atas adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan penerapan sistem kerja WFO dan WFH.

#### Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara merupakan strategi BPK dalam mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan menghasilkan ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi lembaga pendidikan keuangan negara yang lain.

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Diklat diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi peserta pascadiklat, dan implementasi materi diklat pada organisasi sehingga kinerja BPK semakin baik.

Selama Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, antara lain melalui pengalihan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (*online*) melalui *e-learning* dan *Learning Management System* (LMS) sebagai usaha menghadapi pandemi COVID-19, memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kediklatan baik dari kualitas layanan sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran. Selain itu juga dilakukan penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama.

Strategi ini diampu oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN). Pada Tahun 2020, ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 4 ini diukur atas 13 indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.



## 1. Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja

Indikator ini menunjukkan kinerja satuan kerja yang merupakan hasil kerja secara kualitas dan/atau kuantitas yang dapat dicapai oleh satuan kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya, dhi. terkait QA dan QC pada satker pemeriksaan. Indikator ini mengukur peningkatan kinerja satuan kerja atas keberhasilan program pelatihan individu yang berdampak pada peningkatan kinerja individu dan kinerja satuan kerja dalam hal pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui QA dan QC. Indikator ini merupakan evaluasi level 4 sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan diklat, di mana pada periode Tahun 2020 yang diukur adalah capaian atas pemenuhan QA dan QC pada satker pemeriksaan. Capaian Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja diukur dengan membandingkan jumlah satker pemeriksaan yang memenuhi kinerja atas QA dan QC pemeriksaan sebesar 100% dengan jumlah satker pemeriksaan yang menerapkan QA dan QC. IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020.

Berdasarkan pengukuran, realisasi Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja pada Tahun 2020 sebesar 87,50%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 87,50%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 1 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 66.

**Tabel 66 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 4 Tahun 2018-2020**

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	100%
Realisasi	NA*	NA*	87,50%
Capaian	NA*	NA*	87,50%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020—2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 67.

**Tabel 67 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	87,50%	87,50%

Tabel 67 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 tercapai sebesar 87,50%.

## 2. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya

Indikator ini menunjukkan keberhasilan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu. IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020. Indikator Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya diukur dengan membandingkan jumlah alumni diklat dari internal BPK yang meningkat kinerjanya dengan jumlah alumni diklat dari internal BPK.

Berdasarkan pengukuran dari 281 alumni diklat yang dievaluasi, terdapat 265 alumni yang meningkat kinerjanya. Dengan demikian, realisasi Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya pada Tahun 2020 sebesar 94,31%, di atas target yang ditetapkan sebesar 50%, sehingga capaiannya sebesar 188,62%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 2 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 68.

Tabel 68 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 4 Tahun 2018-2020

IKU 2 Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	50%
Realisasi	NA*	NA*	94,31%
Capaian	NA*	NA*	188,62%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 69.

Tabel 69 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	50%	51%	52%	53%	54%	94,31%	174,65%

Tabel 69 menunjukkan bahwa realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 tercapai sebesar 174,65%.

## 3. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat

Indikator ini menunjukkan kepuasan atasan langsung atas kinerja bawahan yang telah mengikuti diklat dan mampu mengaplikasikan dengan baik hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat pada Tahun 2020 diukur

melalui survei internal yang merupakan evaluasi level 3. Survei internal ini menggunakan skala pengukuran 1 – 5 di mana nilai:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan pengukuran, realisasi Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat pada Tahun 2020 mencapai Sangat Memuaskan (4,05), di atas target yang ditetapkan yakni Memuaskan (3,50), sehingga capaiannya sebesar 115,71%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 3 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 70.

**Tabel 70 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 4 Tahun 2018-2020**

IKU 3 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	3,50
Realisasi	NA*	NA*	4,05
Capaian	NA*	NA*	115,71%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 71.

**Tabel 71 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat	3,50	3,60	3,80	3,90	4,00	4,05	101,25%

Tabel 71 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 tercapai sebesar 101,25%.

#### 4. Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal “Memuaskan”

Indikator ini menunjukkan standar nilai kelulusan yang dipersyaratkan berupa nilai minimum yang wajib dipenuhi oleh pegawai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan kepemimpinan. Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal “Memuaskan” diukur dengan membandingkan antara jumlah peserta diklat fungsional

dan kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal "Memuaskan" dengan jumlah keseluruhan peserta diklat fungsional dan kepemimpinan.

Berdasarkan pengukuran, realisasi Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan" pada Tahun 2020 sebesar 100%, di atas target yang ditetapkan sebesar 50%, sehingga capaiannya sebesar 200%. Ketercapaian atas indikator ini terjadi karena dari 28 orang peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas Tahun 2020 dan 28 orang peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2020, seluruhnya lulus dengan predikat minimal "Memuaskan", sehingga realisasi indikator ini mencapai 100%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya komitmen Badiklat PKN dalam memberikan layanan kediklatan yang mampu meningkatkan persentase lulusan diklat dengan predikat minimal "Memuaskan". Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 72.

**Tabel 72 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 4 Tahun 2018-2020**

IKU 4 Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan"	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	30%	40%	50%
Realisasi	41,30%	83,22%	100%
Capaian	137,67%	208,05%	200%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	+41,92	+16,78

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 73.

**Tabel 73 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan"	50%	55%	60%	65%	70%	100%	142,86%

Tabel 73 menunjukkan bahwa realisasi IKU Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan" Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 tercapai sebesar 142,86%. Diharapkan IKU ini dapat selalu tercapai realisasinya hingga Tahun 2024.

## 5. Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi

Indikator ini menunjukkan persepsi peserta diklat dan peserta sertifikasi terhadap kualitas pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan diklat dan sertifikasi yang mencakup sarana dan prasarana, kualitas fasilitator dan kualitas media pembelajaran (berupa kurikulum, silabus, modul, dll). Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi diukur melalui survei internal dan menunjukkan tingkat kepuasan peserta atas sarana dan prasarana,

tingkat kepuasan atas kualitas fasilitator, dan tingkat kepuasan atas media pembelajaran. Survei internal ini menggunakan skala pengukuran 1 – 5 di mana nilai:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan pengukuran, realisasi Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi pada Tahun 2020 mencapai Sangat Memuaskan (4,35), di atas target yang ditetapkan yakni Sangat Memuaskan (4,20) sehingga capaiannya sebesar 103,57%. Realisasi IKU Tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Badiklat PKN terus berkomitmen dalam menyediakan sarana dan prasarana, kualitas fasilitator dan kualitas media pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat dan sertifikasi. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 74.

**Tabel 74 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 4 Tahun 2018-2020**

IKU 5 Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	4,00	4,10	4,20
Realisasi	4,04	4,17	4,35
Capaian	100,88%	101,79%	103,57%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	+0,13	+0,18

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 75.

**Tabel 75 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi	4,20	4,20	4,30	4,30	4,40	4,35	98,86%

Tabel 75 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 98,86%.

## 6. Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi

Indikator ini menunjukkan tingkat pemenuhan atas sertifikasi dan akreditasi dalam bentuk capaian tingkat kelulusan dalam program sertifikasi dan akreditasi. Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi diukur dengan membandingkan antara jumlah peserta sertifikasi keahlian PKN dan sertifikat kompetensi teknis yang lulus dengan jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi keahlian PKN dan kompetensi teknis, kemudian dijumlahkan dengan perbandingan antara jumlah lembaga

akreditasi yang lulus dengan jumlah lembaga yang mengikuti akreditasi sesuai dengan proporsi dalam formulasi capaian IKU.

Berdasarkan pengukuran, realisasi Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi pada Tahun 2020 sebesar 71,02%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 85%, sehingga capaiannya sebesar 83,56%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena dari 350 peserta yang mengikuti program Sertifikasi KAP, hanya 248 orang yang dinyatakan lulus. Sedangkan untuk program akreditasi, belum dapat dihitung capaiannya karena Badiklat PKN masih dalam proses penyusunan perangkat akreditasi. Dengan demikian, capaian pada Tahun 2020 merupakan capaian atas program sertifikasi saja. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 76.

**Tabel 76 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 4 Tahun 2018-2020**

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	80%	85%	85%
Realisasi	89,04%	100%	71,02%
Capaian	111,30%	117,65%	83,56%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	+10,96	-28,98

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 77.

**Tabel 77 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi	85%	90%	95%	100%	100%	71,02%	71,02%

Tabel 77 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 71,02%. Diharapkan IKU ini dapat tercapai realisasinya setiap tahun hingga Tahun 2024.

## 7. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN

Indikator ini menunjukkan terjalannya kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi oleh Badiklat PKN dengan para mitra kerja samanya. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN merupakan IKU baru di Tahun 2020 dan diukur melalui survei yang dilakukan oleh PT Wahana Data Utama dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan pengukuran, realisasi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN pada Tahun 2020 mencapai Sangat Memuaskan (4,21), di atas target yang ditetapkan yakni Sangat Memuaskan (4,20), sehingga capaiannya sebesar 100,24%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 7 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 78.

**Tabel 78 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 4 Tahun 2018-2020**

IKU 7 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	4,20
Realisasi	NA*	NA*	4,21
Capaian	NA*	NA*	100,24%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020—2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 79.

**Tabel 79 - Perbandingan Realisasi IKU 7 Strategi 4 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020—2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN	4,20	4,20	4,30	4,30	4,40	4,21	95,68%

Tabel 79 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 95,68%.

## 8. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Badiklat PKN juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 4 “Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara” yang diukur keberhasilannya melalui 13 indikator di atas, **upaya efisiensi** yang dilakukan oleh BPK adalah sebagai berikut.



1. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam menghadapi pandemi COVID-19, di antaranya dengan mengalihkan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (*online*) melalui *e-learning* dan *Learning Management System* (LMS). Manfaat pelaksanaan diklat secara daring (*online*) antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi waktu.
2. Melaksanakan diklat secara mandiri oleh masing-masing satuan kerja yang telah disetujui oleh Badiklat PKN. Manfaat penerapan diklat secara mandiri antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja barang.

### Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, sehingga Strategi 5 tentang “Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara” dirumuskan untuk: (1) memberikan pertimbangan secara aktif terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan pemeriksaan keuangan negara, yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara; (2) memperkuat aspek-aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, agar proses pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan termitigasi dari risiko tuntutan/gugatan hukum dari pihak lain; serta (3) meningkatkan peran aktif BPK dalam penyelesaian kasus ganti kerugian negara, baik yang disebabkan oleh Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lainnya.

Selama Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui serangkaian diklat dan *workshop* serta FGD yang melibatkan para ahli, serta berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya.
2. Pelaksanaan konsultasi hukum secara *online* melalui Sistem Manajemen Hukum, keterjangkauan dan kemudahan layanan konsultasi hukum, baik secara *on site*, *on desk* dan/atau *web base*, yang dilaksanakan baik pada tahap pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pada tahap pelaporan.
3. Pelaksanaan penggalan data dan informasi atas seluruh kasus tuntutan perbendaharaan dan atas seluruh permintaan rekomendasi yang masuk.
4. Kegiatan inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pemastian atas ketersediaan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK melalui konsep produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, kajian terkait sinkronisasi atas konsep produk hukum BPK, dan

pelaksanaan proses legislasi produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK; komunikasi dan koordinasi dengan satker terkait maupun pihak lain dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) terkait dengan penyusunan konsep produk hukum BPK; sosialisasi produk hukum atas produk hukum BPK.

5. Kegiatan kajian terkait sinkronisasi atas konsep produk hukum BPK, analisis peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi dan/atau bertentangan dengan tugas dan kewenangan BPK; dan pembuatan *action plan* (rencana aksi) atas hasil analisis (dapat berupa pembahasan internal di Forum Eselon I; bahan pendapat/usulan revisi undang-undang; rencana *judicial review*, sengketa kewenangan lembaga).
6. Kegiatan peningkatan kualitas pendampingan keterangan ahli dan penanganan perkara yang melibatkan BPK baik di persidangan maupun di luar persidangan.

Strategi 5 diampu oleh Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum). Pada Tahun 2020, ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 5 ini diukur atas sebelas IKU. Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi 5 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK**

IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK menunjukkan tingkat kontribusi BPK dalam memberikan bahan pertimbangan atas rancangan dan peraturan perundang-undangan keuangan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPK. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024. Capaian indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK yang dihasilkan dengan yang direncanakan akan diberikan.

Sesuai dengan target IKU Tahun 2020, Ditama Binbangkum telah menyusun tiga pendapat hukum yang diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

- Pendapat Hukum atas Laporan Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah);
- Pendapat Hukum atas Pemeriksaan Laporan Keuangan PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum); dan
- Tanggapan atas Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dengan demikian Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK pada Tahun 2020 adalah sebesar 100% dan sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 1 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 80.

**Tabel 80 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 5 Tahun 2018-2020**

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	100%
Realisasi	NA*	NA*	100%
Capaian	NA*	NA*	100%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 81.

**Tabel 81 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 81 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

## 2. Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK

IKU Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan menunjukkan tingkat pemenuhan atas ketersediaan peraturan yang dibutuhkan BPK untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Capaian tersebut diukur dengan membandingkan jumlah rancangan Peraturan BPK yang telah disusun dan telah disampaikan ke Badan dibandingkan dengan jumlah rancangan Peraturan BPK yang harus diselesaikan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Program Legislasi BPK Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2020, Ditama Binbangkum telah menyusun lima Peraturan BPK sesuai dengan target IKU. Kelima Peraturan BPK tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.

2. Peraturan BPK tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.
3. Peraturan BPK tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024.
4. Peraturan BPK tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan demikian, Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK pada Tahun 2020 adalah sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Pada Renstra BPK 2016-2019 nomenklatur IKU ini adalah "Tingkat Pemenuhan Rancangan Peraturan yang Terkait dengan Tugas dan Wewenang BPK". Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 82 berikut.

**Tabel 82 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 5 Tahun 2018-2020**

IKU 2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	-	-

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 83 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 83 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

### 3. Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK

IKU Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024. Indikator ini

menunjukkan tingkat respons Ditama Binbangkum dalam memenuhi permintaan layanan bantuan dan konsultasi hukum dalam Pemeriksaan BPK. Capaian atas IKU Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK diukur dengan membandingkan jumlah layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK yang diberikan dengan jumlah permintaan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK pada Tahun 2020 sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2020, Ditama Binbangkum telah memenuhi seluruh permintaan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK. Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK dapat dilihat pada Tabel 84 berikut.

**Tabel 84 - Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2020**

Satuan Kerja	Jenis Layanan	Jumlah Permintaan	Jumlah Pemenuhan	Capaian
Direktorat LPBH	Bantuan Hukum	35	35	100%
Direktorat KHK	Konsultasi Hukum	83	83	100%
Jumlah		118	94	100%

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 3 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 85 berikut.

**Tabel 85 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 5 Tahun 2018-2020**

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	100%
Realisasi	NA*	NA*	100%
Capaian	NA*	NA*	100%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020—2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 86 berikut.

**Tabel 86 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020—2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 86 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

#### 4. Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD

IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD merupakan penyebutan baru untuk IKU dari Renstra 2016-2020 dengan nomenklatur awal "Tingkat Penyelesaian Penetapan Kerugian Perbendaharaan". IKU ini menunjukkan peran Ditama Binbangkum dalam menilai/menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. IKU ini bertujuan mendorong proses percepatan pengembalian kerugian negara/daerah. Melalui IKU ini diharapkan proses penilaian dan penetapan kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan lembaga atau badan lainnya dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga kerugian negara/daerah dapat lebih cepat dipulihkan.

Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD diukur dengan membandingkan jumlah kasus yang telah selesai diproses dengan jumlah kasus yang masuk ke Panitera. Kasus yang masuk diukur secara kumulatif atas seluruh kasus yang telah didaftarkan dalam daftar kasus kerugian negara/daerah terhadap bendahara.

Pada Tahun 2020, BPK telah menilai dan menetapkan sebanyak 39 dari 39 kasus bendahara yang teregister. Dengan demikian, Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD pada Tahun 2020 adalah sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IKU tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 87 berikut.

Tabel 87 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 5 Tahun 2018-2020

IKU 4 Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	100%	100%	100%
Realisasi	98,15%	99,44%	100%
Capaian	98,15%	99,44%	100%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	+1,29%	+0,56%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan dalam Tabel 88 berikut.

Tabel 88 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 88 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

#### 5. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK dalam Penghapusan Piutang Negara/ Daerah yang berasal dari TP/TGR

Indikator kinerja ini merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan menunjukkan kontribusi Ditama Binbangkum dalam penyelesaian bahan pertimbangan BPK atas penghapusan piutang kerugian negara/daerah yang berasal dari TP/TGR. Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK dalam Penghapusan Piutang Negara/ Daerah yang berasal dari TP/TGR diukur dari persentase penyelesaian permintaan rekomendasi penghapusan piutang yang masuk, yaitu perbandingan antara jumlah bahan rekomendasi yang disampaikan, dengan jumlah permintaan rekomendasi penghapusan piutang tersebut.

Pada Tahun 2020, Ditama Binbangkum berhasil menyelesaikan seluruh permintaan rekomendasi penghapusan piutang TP/TGR sebanyak dua permintaan. Dengan demikian, Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK dalam Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang berasal dari TP/TGR pada Tahun 2020 adalah sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 5 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 89 berikut.

Tabel 89 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 5 Tahun 2018-2020

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK dalam Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang berasal dari TP/TGR	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	100%
Realisasi	NA*	NA*	100%
Capaian	NA*	NA*	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020–2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 90 berikut.



Tabel 90 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 5 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK dalam Penghapusan Piutang Negara/ Daerah yang berasal dari TP/TGR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 90 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK dalam Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang berasal dari TP/TGR Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

## 6. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Ditama Binbangkum juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Selain berupaya mencapai Strategi 5 “Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara” yang diukur keberhasilannya melalui sebelas indikator di atas, Ditama Binbangkum juga berupaya meningkatkan **efisiensi** dengan berbagai langkah sebagai berikut.

1. Melaksanakan konsultasi hukum secara *online* melalui Sistem Manajemen Hukum, keterjangkauan dan kemudahan layanan konsultasi hukum, baik secara *on site*, *on desk* dan/atau *web base*, yang dilaksanakan baik pada tahap pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pada tahap pelaporan.
2. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya serta melaksanakan penggalian data dan informasi atas seluruh permintaan rekomendasi BPK dalam penghapusan piutang negara/ daerah yang berasal dari TP/TGR.
3. Melaksanakan kegiatan inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan ketersediaan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK melalui konsep produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.

## Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi 6 dilaksanakan pada arah kebijakan peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi ini merupakan perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan. Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Selama Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, antara lain melalui pelaksanaan komunikasi dan pengelolaan informasi secara terkoordinasi dan berkualitas, pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan sistem merit, pengelolaan keuangan BPK secara andal, transparan, akuntabel dan *modern*, pengelolaan sarana dan prasarana yang mempertimbangkan lingkungan dan efisiensi energi dalam rangka menuju *eco-office* dan *smart office*, peningkatan fungsi *monitoring* implementasi kebijakan BPK serta penerapan pola kerja berbasis sistem informasi disertai peningkatan keamanan akses data dan informasi.

Strategi ini diampu oleh Sekretariat Jenderal. Pada Tahun 2020, ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 6 ini diukur atas 12 indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian masing-masing IKU yang mendukung Strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK. IKU ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro Humas dan KSI) dan seluruh Kantor BPK Perwakilan (dhi. Subbag. Humas). Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diukur melalui survei oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal yaitu mitra domestik (IAI, KAP, Perguruan Tinggi, dan media massa), *auditee*, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum (IPH) termasuk responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor BPK Perwakilan wilayah barat dan timur. Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan pengukuran, realisasi Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada Tahun 2020 sebesar 3,96 (Memuaskan), di bawah target yang

ditetapkan sebesar 4,00 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya sebesar 99,00%. Walaupun di bawah target, realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa BPK telah meningkatkan kinerja komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi di antaranya melalui kegiatan berikut ini.

- Penyediaan media informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, misalnya melalui situs [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) atau media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube.
- Penerapan pola komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan, contohnya melalui media sosial.
- Penyebarluasan informasi terkini (*up to date*) kepada publik secara berkala.
- Pemberian tanggapan/respons atas pengaduan maupun umpan balik yang disampaikan oleh pemangku kepentingan, yang disampaikan antara lain melalui situs [e-ppid.bpk.go.id](http://e-ppid.bpk.go.id) atau aplikasi SIPADU.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 91 berikut.

**Tabel 91 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 6 Tahun 2018-2020**

IKU 1 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	3,90	4,10	4,00
Realisasi	3,76	3,80	3,96
Capaian	96,41%	92,68%	99,00%
Perubahan Realisasi ( $\Delta$ )	-	+0,04	+0,16

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 92 berikut.

**Tabel 92 - Perbandingan Realisasi IKU 1 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96	99,00%

Tabel 92 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 99,00%. Diharapkan IKU ini dapat dicapai setiap tahun hingga tahun 2024.

## 2. Penilaian Penerapan Sistem Merit

IKU Penilaian Sistem Merit merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan bertujuan untuk mengukur level keterterapan sistem merit di lingkungan BPK yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro SDM). Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks atau nilai sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit di BPK (sesuai Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit). Capaian Penerapan Sistem Merit tersebut diukur melalui penilaian secara mandiri (*self assesment*) oleh tim penilai mandiri sistem merit BPK, yang kemudian divalidasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menggunakan skala sebagai berikut (sesuai Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019).

- 100 - 174 = buruk
- 175 - 249 = kurang
- 250 - 324 = baik
- 325 - 400 = sangat baik

Berdasarkan pengukuran, realisasi Penilaian Penerapan Sistem Merit pada Tahun 2020 sebesar 354 (Sangat Baik), memenuhi target yang ditetapkan sebesar 354 (Sangat Baik), sehingga capaiannya sebesar 100 %. Nilai ini merupakan hasil penetapan dari KASN pada Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KASN Nomor 04/KEP.KASN/C/I/2020 tanggal 07 Januari 2020.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 2 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 93 berikut.

Tabel 93 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 6 Tahun 2018-2020

IKU 2 Penilaian Penerapan Sistem Merit	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	354
Realisasi	NA*	NA*	354
Capaian	NA*	NA*	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 94 berikut.

Tabel 94 - Perbandingan Realisasi IKU 2 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Penilaian Penerapan Sistem Merit	354	359	364	369	374	354	94,65%

Tabel 94 menunjukkan bahwa realisasi IKU Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 94,65%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai setiap tahun hingga Tahun 2024.

### 3. Penilaian Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. IKU Penerapan Sistem SPBE merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan bertujuan untuk mengukur level keterterapan SPBE di lingkungan BPK yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro TI). Capaian Penerapan Sistem SPBE diukur melalui penilaian secara mandiri (*self assesment*) oleh tim penilai mandiri SPBE BPK, yang selanjutnya akan divalidasi oleh Kementerian PANRB, menggunakan skala sebagai berikut (sesuai Peraturan Menpan Nomor 5 Tahun 2018).

- 4,2 –5,0 : Memuaskan
- 3,5 –< 4,2 : Sangat Baik
- 2,6 –< 3,5 : Baik
- 1,8 –< 2,6 : Cukup
- < 1,8 : Kurang

Berdasarkan pengukuran, Penilaian Penerapan SPBE pada Tahun 2020 sebesar 4,13 (Sangat Baik), di atas target yang ditetapkan sebesar 3,90 (Sangat Baik), sehingga capaiannya sebesar 105,90%. Nilai tersebut sementara menggunakan hasil penilaian dari tim penilai mandiri SPBE BPK untuk Tahun 2020, karena hingga akhir Triwulan IV Tahun 2020 ketetapan dari Kementerian PANRB atas validasi hasil penilaian mandiri SPBE BPK Tahun 2020 masih belum terbit.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 3 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 95 berikut.

Tabel 95 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 6 Tahun 2018-2020

IKU 2 Penilaian Penerapan SPBE	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	3,90
Realisasi	NA*	NA*	4,13
Capaian	NA*	NA*	105,90%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\* merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 96 berikut.

**Tabel 96 - Perbandingan Realisasi IKU 3 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Penilaian Penerapan SPBE	3,90	4,00	4,10	4,20	4,30	4,13	96,05%

Tabel 96 menunjukkan bahwa realisasi IKU Penilaian Penerapan SPBE Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 96,05%. Diharapkan target tahunan IKU Penerapan Sistem SPBE dapat dicapai seluruhnya hingga Tahun 2024.

#### 4. Opini Laporan Keuangan BPK

Indikator ini menunjukkan upaya BPK dalam mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang transparan dan akuntabel. Capaian IKU Opini Laporan Keuangan BPK diukur berdasarkan opini hasil audit atas Laporan Keuangan BPK yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen.

Berdasarkan hasil audit KAP independen, Opini Laporan Keuangan BPK Tahun 2020 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau sama dengan target yang ditetapkan yaitu opini WTP, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2020 sama dengan capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK, melalui Sekretariat Jenderal, telah mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 97 berikut.

**Tabel 97 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 6 Tahun 2018-2020**

IKU 4 Opini Laporan Keuangan BPK	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	WTP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP
Capaian	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi (Δ)	-	-	-

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 98 berikut.

**Tabel 98 - Perbandingan Realisasi IKU 4 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Tabel 98 menunjukkan bahwa realisasi IKU Opini Laporan Keuangan BPK Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 100%. Diharapkan laporan keuangan BPK selalu mendapatkan opini WTP hingga Tahun 2024.

## 5. Tingkat Kinerja Anggaran BPK

Indikator Kinerja Anggaran BPK merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja atas aspek manfaat, konteks dan implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214 Tahun 2017, serta untuk mengukur tingkat pelaksanaan anggaran berdasarkan PMK nomor 195 Tahun 2018 pada seluruh satker di BPK yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro Keuangan). Capaian IKU Kinerja Anggaran BPK diukur melalui hasil penilaian atas dua dimensi pengukuran yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), di mana formula perhitungannya menggunakan komposisi sebagai berikut: 60% Nilai EKA + 40% Nilai EPA.

Berdasarkan pengukuran, Tingkat Kinerja Anggaran BPK pada Tahun 2020 sebesar 95,88%, di atas target yang ditetapkan sebesar 94%, sehingga capaiannya sebesar 102%.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 5 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 99.

**Tabel 99 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 6 Tahun 2018-2020**

IKU 5 Tingkat Kinerja Anggaran BPK	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	94%
Realisasi	NA*	NA*	95,88%
Capaian	NA*	NA*	102,00%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 100 berikut.

**Tabel 100 - Perbandingan Realisasi IKU 5 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kinerja Anggaran BPK	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%	95,88	99,88%

Tabel 100 menunjukkan bahwa realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran BPK Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 99,88%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai setiap tahun hingga berakhirnya Renstra di Tahun 2024.



## 6. Indeks Kebahagiaan Pegawai

Indikator Indeks Kebahagiaan Pegawai merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan menunjukkan tingkat kebahagiaan pegawai BPK yang diukur dari empat variabel utama yaitu: 1) kebahagiaan terhadap pekerjaan; 2) kebahagiaan terhadap penghasilan; 3) kebahagiaan terhadap kesehatan; dan 4) kebahagiaan terhadap pendidikan. Indikator ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro SDM). Capaian tersebut diukur melalui survei oleh lembaga independen dengan sasaran responden internal yaitu pegawai BPK dan dilaksanakan secara tahunan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut.

- 80 - 100 : Sangat Bahagia
- 60 - 79,9 : Bahagia
- 40 - 59,9 : Biasa saja
- 20 - 39,9 : Kurang Bahagia
- 0 - 19,9 : Tidak Bahagia

Berdasarkan pengukuran, Indeks Kebahagiaan Pegawai pada Tahun 2020 sebesar 72,78 (Bahagia), di bawah target yang ditetapkan sebesar 75 (Bahagia), sehingga capaiannya sebesar 97,04%. Belum tercapainya target IKU ini disebabkan rendahnya nilai dari salah satu aspek kebahagiaan yang diukur, yaitu kebahagiaan terhadap kesehatan dengan nilai sebesar 67,08.

Oleh karena IKU ini merupakan indikator baru, maka capaian IKU 6 pada Tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 101 berikut.

**Tabel 101 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 6 Tahun 2018-2020**

IKU 6 Indeks Kebahagiaan Pegawai	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	NA*	NA*	75
Realisasi	NA*	NA*	72,78
Capaian	NA*	NA*	97,04%
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA*	-

\*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada Tabel 102 berikut.

**Tabel 102 - Perbandingan Realisasi IKU 6 Strategi 6 terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

IKU	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kebahagiaan Pegawai	75	76	77	78	80	72,78	90,98%

Tabel 102 menunjukkan bahwa realisasi IKU Indeks Kebahagiaan Pegawai Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 90,98%. Diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

## 7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Sekretariat Jenderal juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 6 “Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan” yang diukur keberhasilannya melalui 12 indikator kinerja di atas, **upaya efisiensi** yang dilakukan oleh BPK adalah:

1. Melakukan standardisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK, dalam rangka peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informasi kepada para pemangku kepentingan.
2. Melakukan pemetaan terkait kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan dalam setiap jabatan dan setiap satker dalam rangka mendukung penerapan sistem merit di BPK.
3. Melakukan pengembangan aplikasi yang dapat membantu pelaksanaan pekerjaan, seperti aplikasi Persuratan, aplikasi PRISMA dan aplikasi lainnya.
4. Melakukan pengembangan aplikasi secara mandiri (dhi. Biro TI) dengan melibatkan satuan kerja terkait. Hal ini selain dapat menghemat biaya pengembangan aplikasi juga dapat mempermudah pelaksanaan integrasi antara berbagai aplikasi di BPK.
5. Melakukan integrasi sistem, *database* dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam menghadapi pandemi Covid-19, di antaranya melalui penyediaan akses jaringan komputer kantor melalui VPN yang aman dan andal sehingga dapat mendukung penerapan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*).
7. Meningkatkan kualitas pemantauan anggaran seluruh satker BPK melalui pelaksanaan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala). Pelaksanaan forum ini juga bertujuan untuk membarui pengetahuan dan perkembangan peraturan terkait pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.
8. Melakukan identifikasi kebutuhan diklat pada awal tahun dan melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan jam diklat pegawai per triwulan.
9. Melakukan identifikasi atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja dan menyusun rencana aksi penanganan risiko tersebut dalam pelaksanaan anggaran TA 2020.

## Indikator Kinerja Generik

Selain diukur oleh Indikator -Indikator Kinerja Utama tersebut di atas, kinerja organisasi juga diukur dengan indikator kinerja lainnya, yaitu Indikator Kinerja Generik (IKU Generik). Indikator ini merupakan indikator yang sifatnya generik dan diukur secara simultan di seluruh Unit dan Satuan Kerja di BPK. Indikator kinerja ini perlu diukur untuk mendorong kinerja Unit Kerja pengampu dalam usaha pencapaian strategi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Terdapat enam IKU generik yang telah ditetapkan untuk diukur capaiannya pada Tahun 2020. Penjelasan atas IKU generik secara keseluruhan dan capaian indikator kinerja tersebut selama tiga tahun terakhir pada Unit dan Satuan Kerja di BPK disajikan sebagai berikut.

### 1. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei oleh pihak independen dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini per masing-masing Strategi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 103 - Perkembangan Capaian IKU Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2018-2020**

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2018	2019	2020
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,58	4,73	4,66
		Capaian	91,60%	94,60%	93,20%
Strategi 2	AKN I	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,70	4,72	4,72
		Capaian	94%	94,40%	94,40%
	AKN II	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,60	4,74	4,59
		Capaian	92%	94,80%	91,80%
	AKN III	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,56	4,72	4,63
		Capaian	92%	94,40%	92,60%

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2018	2019	2020
	AKN IV	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,62	4,72	4,66
		Capaian	92,40%	94,40%	93,20%
	AKN V	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,61	4,72	4,56
		Capaian	92,20%	94,40%	91,20%
	AKN VI	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,57	4,74	4,53
		Capaian	91,40%	94,80%	90,60%
	AKN VII	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,61	4,72	4,58
		Capaian	92,20%	94,40%	91,60%
AUI	Target	5,0	5,0	5,0	
	Realisasi	4,53	4,73	4,71	
	Capaian	90,67%	94,60%	94,20%	
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,53	4,73	4,66
		Capaian	90,60%	94,60%	93,20%
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,72	4,72	4,51
		Capaian	94,40%	94,40%	90,20%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,67	4,74	4,71
		Capaian	93,40%	94,80%	94,20%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	5,0	5,0	5,0
		Realisasi	4,40	4,73	4,50
		Capaian	88,00%	94,60%	90,00%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

Tabel 104 - Perbandingan Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,66	93,20%
Strategi 2	AKN I	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,72	94,40%
	AKN II	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,59	91,80%
	AKN III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,63	92,60%
	AKN IV	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,66	93,20%
	AKN V	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,56	91,20%
	AKN VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,53	90,60%
	AKN VII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,58	91,60%
	AUI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,71	94,20%
Strategi 3	Inspektorat Utama	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,66	93,20%
Strategi 4	Badiklat PKN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,51	90,20%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,71	94,20%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	90,00%

Berdasarkan data capaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang telah disajikan, realisasi IKU pada seluruh strategi di Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan pegawai tentang pemahaman visi, misi, implementasi nilai-nilai dasar dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan perlu lebih dioptimalkan sehingga IKU ini dapat terpenuhi pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

## 2. Hasil Evaluasi AKIP

Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Tujuan dari dilakukannya pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Pengukuran indikator ini sesuai dengan PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, di mana nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini per masing-masing Strategi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 105 - Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2018-2020

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2018	2019	2020
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	BB	A	AA (92,79)
		Capaian	88,89%	90%	107,89%
Strategi 2	AKN I	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	BB	A	A (85,82)
		Capaian	88,89%	90%	99,79%
	AKN II	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	BB	A	A (89,44)
		Capaian	88,89%	90%	104%
	AKN III	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	BB	A	AA (91,83)
		Capaian	88,89%	90%	106,78%
	AKN IV	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	BB	A	AA (90,50)
		Capaian	88,89%	90%	105,23%
	AKN V	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	A	A	AA (91,57)
		Capaian	100%	90%	106,47%
	AKN VI	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	B	BB	A (89,19)
		Capaian	77,78%	80%	103,71%
	AKN VII	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	BB	A	A (89,22)
		Capaian	88,89%	90%	103,75%
AUI	Target	A	AA	A (86,00)	
	Realisasi	A	A	92,24	
	Capaian	100%	90%	107,26%	
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	A	AA	A (90,76)
		Capaian	100%	100%	105,53%
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	A	A	AA (92,38)
		Capaian	100%	90%	107,42%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	BB	A	A (89,54)
		Capaian	88,89%	90%	104,12%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	A	AA	A (86,00)
		Realisasi	BB	A	AA (94,94)
		Capaian	88,39%	90%	110,40%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra BPK 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

Tabel 106 - Perbandingan Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (92,79)	103,04%
Strategi 2	AKN I	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (85,82)	95,30%
	AKN II	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (89,44)	99,32%
	AKN III	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (91,83)	101,98%
	AKN IV	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (90,50)	100,50%
	AKN V	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (91,57)	101,69%
	AKN VI	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (89,19)	99,04%
	AKN VII	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (89,22)	99,08%
	AUI	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (92,24)	102,43%
Strategi 3	Inspektorat Utama	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (90,76)	100,79%
Strategi 4	Badiklat PKN	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (92,38)	102,59%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (89,54)	99,43%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (94,94)	105,43%

Berdasarkan data capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP yang telah disajikan, realisasi IKU pada seluruh strategi di Tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar unit kerja telah optimal dalam melakukan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing unit kerjanya. Namun, pengelolaan akuntabilitas kinerja perlu selalu dievaluasi oleh Itama agar unit kerja yang telah memenuhi capaian IKU ini dapat mempertahankannya dan juga mendorong unit kerja lain yang belum memenuhi capaian IKU ini untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kerjanya. Dengan demikian, pemenuhan IKU ini dapat dicapai oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

### 3. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Capaian tersebut diukur berdasarkan pemanfaatan layanan dasar (*email, edrive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM) dan pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan.



Sementara untuk Unit Kerja Pemeriksaan juga termasuk pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiPTL, dan *e-audit*).

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini per masing-masing Strategi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 107 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2018-2020**

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2018	2019	2020
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	90%	95%	95%
		Realisasi	97,58%	99,62%	99,69%
		Capaian	108,42%	104,86%	104,93%
Strategi 2	AKN I	Target	80%	95%	95%
		Realisasi	97,98%	99%	99,17%
		Capaian	122,48%	104,21%	104,39%
	AKN II	Target	80%	95%	95%
		Realisasi	99,10%	99,18%	99,31%
		Capaian	123,88%	104,40%	104,54%
	AKN III	Target	80%	95%	95%
		Realisasi	99,13%	98,56%	98,80%
		Capaian	123,91%	103,75%	104%
	AKN IV	Target	80%	95%	95%
		Realisasi	97,69%	99,43%	99,41%
		Capaian	122,11%	104,66%	104,64%
	AKN V	Target	80%	95%	95%
		Realisasi	93,50%	98,84%	99,10%
		Capaian	116,88%	104,04%	104,32%
	AKN VI	Target	80%	95%	95%
		Realisasi	92,39%	99,08%	96,21%
		Capaian	115,49%	104,29%	101,27%
	AKN VII	Target	80%	95%	95%
		Realisasi	97,08%	99,24%	99,37%
		Capaian	121,35%	104,46%	104,60%
AUI	Target	80%	95%	95%	
	Realisasi	97,96%	99,59%	99,66%	
	Capaian	122,45%	104,83%	104,91%	
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	90%	95%	95%
		Realisasi	98,79%	100%	100%
		Capaian	109,77%	105,26%	105,26%
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	90%	95%	95%
		Realisasi	91,91%	99,03%	99,19%
		Capaian	102,12%	104,24%	104,41%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	90%	95%	95%
		Realisasi	95,09%	99,21%	99,34%
		Capaian	105,66%	104,43%	104,57%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	90%	95%	95%
		Realisasi	92,54%	98,40%	98,67%
		Capaian	108,87%	103,58%	103,86%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra BPK 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

**Tabel 108 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	95%	96%	97%	98%	100%	99,69%	99,69%
Strategi 2	AKN I	95%	96%	97%	98%	100%	99,17%	99,17%
	AKN II	95%	96%	97%	98%	100%	99,31%	99,31%
	AKN III	95%	96%	97%	98%	100%	98,80%	98,80%
	AKN IV	95%	96%	97%	98%	100%	99,41%	99,41%
	AKN V	95%	96%	97%	98%	100%	99,10%	99,10%
	AKN VI	95%	96%	97%	98%	100%	96,21%	96,21%
	AKN VII	95%	96%	97%	98%	100%	99,37%	99,37%
	AUI	95%	96%	97%	98%	100%	99,66%	99,66%
Strategi 3	Inspektorat Utama	95%	96%	97%	98%	100%	100%	100%
Strategi 4	Badiklat PKN	95%	96%	97%	98%	100%	99,19%	99,19%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	95%	96%	97%	98%	100%	99,34%	99,34%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	95%	96%	97%	98%	100%	98,67%	98,67%

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Pemanfaatan TI yang telah disajikan, secara umum realisasi IKU ini di Tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali realisasi pada Strategi 2 yang terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi tersebut masih mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah memanfaatkan layanan TIK secara optimal yang ditandai dengan tingginya kesadaran pegawai dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Akan tetapi, berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pegawai tersebut perlu terus ditingkatkan, baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun sosialisasi kepada seluruh pegawai sebagai *user*. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

#### 4. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini menunjukkan upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif. IKU ini merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024.

Capaian atas IKU ini diukur dengan menghitung tingkat penyusunan *Best Practice*, tingkat penerapan *Best Practice* dan tingkat pelaksanaan aktivitas *Knowledge Management* sesuai dengan proporsi pada formulasinya. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 109 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2018-2020

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2018	2019	2020
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	100%
		Capaian	NA*	NA*	100%
Strategi 2	AKN I	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	8,33%
		Capaian	NA*	NA*	8,33%
	AKN II	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	75%
		Capaian	NA*	NA*	75%
	AKN III	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	100%
		Capaian	NA*	NA*	100%
	AKN IV	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	58,33%
		Capaian	NA*	NA*	58,33%
	AKN V	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	94,47%
		Capaian	NA*	NA*	94,47%
	AKN VI	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	102,63%
		Capaian	NA*	NA*	102,63%
	AKN VII	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	75%
		Capaian	NA*	NA*	75%
AUI	Target	NA*	NA*	100%	
	Realisasi	NA*	NA*	100%	
	Capaian	NA*	NA*	100%	
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	129,17%
		Capaian	NA*	NA*	129,17%
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	100%
		Capaian	NA*	NA*	100%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	112,50%
		Capaian	NA*	NA*	112,50%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	NA*	NA*	100%
		Realisasi	NA*	NA*	79,17%
		Capaian	NA*	NA*	79,17%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra BPK 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

**Tabel 110 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 2	AKN I	100%	100%	100%	100%	100%	8,33%	8,33%
	AKN II	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%
	AKN III	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	AKN IV	100%	100%	100%	100%	100%	58,33%	58,33%
	AKN V	100%	100%	100%	100%	100%	94,47%	94,47%
	AKN VI	100%	100%	100%	100%	100%	102,63%	102,63%
	AUI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 3	Inspektorat Utama	100%	100%	100%	100%	100%	129,17%	129,17%
Strategi 4	Badiklat PKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	100%	100%	100%	100%	100%	112,50%	112,50%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%	79,17%	79,17%

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan yang telah disajikan, secara umum realisasi IKU ini di Tahun 2020 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun IKU ini merupakan IKU baru, namun sebagian unit kerja sudah dapat menerapkan manajemen pengetahuan di masing-masing unit kerjanya dengan baik. Sedangkan realisasi pada Strategi 2 dan Strategi 6 belum dapat mencapai target. Hal tersebut menunjukkan Unit Kerja Pemeriksaan dan Sekretariat Jenderal masih belum secara optimal menerapkan manajemen pengetahuan yang disebabkan masih ada beberapa satuan kerja di bawah kedua Unit Kerja tersebut yang tidak memberikan usulan *best practice* maupun mereplikasi *best practice* serta tidak melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan. Dengan sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan IKU ini akan dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

## 5. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar pengembangan kompetensi di BPK yaitu 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 111 - Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2018-2020

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2018	2019	2020
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	98,74%	100%	98,69%
		Capaian	98,74%	100%	98,69%
Strategi 2	AKN I	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	94,42%	97,13%	94,30%
		Capaian	94,42%	97,13%	94,30%
	AKN II	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	87,17%	99,33%	76,87%
		Capaian	87,17%	99,33%	76,87%
	AKN III	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	87,40%	81,64%	99,62%
		Capaian	87,40%	81,64%	99,62%
	AKN IV	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	90,77%	94,74%	100%
		Capaian	90,77%	94,74%	100%
	AKN V	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	95,44%	96,64%	97,55%
		Capaian	95,44%	96,64%	97,55%
	AKN VI	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	84,78%	94,76%	93,55%
		Capaian	84,78%	94,76%	93,55%
	AKN VII	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	34,93%	94,93%	95,02%
		Capaian	34,93%	94,93%	95,02%
AUI	Target	100%	100%	100%	
	Realisasi	100%	100%	100%	
	Capaian	100%	100%	100%	
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	98,92%	100%
		Capaian	100%	98,92%	100%
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	89,33%	100%	100%
		Capaian	89,33%	100%	100%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	91,89%	100%	98,67%
		Capaian	91,89%	100%	98,67%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	100%	100%	100%
		Realisasi	86,16%	93,14%	97,69%
		Capaian	107,70%	93,14%	97,69%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra BPK 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

**Tabel 112 - Perbandingan Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020–2024**

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	98,69%	98,69%
Strategi 2	AKN I	100%	100%	100%	100%	100%	94,30%	94,30%
	AKN II	100%	100%	100%	100%	100%	76,87%	76,87%
	AKN III	100%	100%	100%	100%	100%	99,62%	99,62%
	AKN IV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	AKN V	100%	100%	100%	100%	100%	97,55%	97,55%
	AKN VI	100%	100%	100%	100%	100%	93,55%	93,55%
	AKN VII	100%	100%	100%	100%	100%	95,02%	95,02%
	AUI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 3	Inspektorat Utama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 4	Badiklat PKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	100%	100%	100%	100%	100%	98,67%	98,67%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%	97,69%	97,69%

Berdasarkan data capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi yang telah disajikan, realisasi IKU ini pada Strategi 1, Strategi 2, dan Strategi 5 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan capaian indikator ini adalah belum optimalnya pelaksanaan manajemen diklat pada unit kerja terkait dan juga masih adanya kesulitan untuk mengelola prioritas antara pekerjaan pegawai dan jadwal diklat.

Sebaliknya, realisasi IKU pada Strategi 3 dan Strategi 6 di Tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Unit Kerja Utama dan Sekretariat Jenderal telah menerapkan manajemen diklat yang baik di satkernya masing-masing sehingga para pegawai tetap dapat mengikuti diklat di tengah rutinitas pekerjaannya yang padat. Salah satu manajemen diklat yang diterapkan oleh Unit Kerja Utama adalah melakukan *monitoring* atas pelaksanaan diklat para pegawai dan juga koordinasi yang baik dengan Badiklat PKN untuk memperoleh jadwal diklat yang sesuai dan dapat diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup Utama.

Sementara itu, Badiklat PKN sebagai unit pengampu Strategi 4 masih dapat mempertahankan realisasi IKU ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%. Terpenuhinya IKU ini secara sempurna oleh Unit Kerja Badiklat PKN diharapkan dapat menjadi contoh bagi unit kerja lain untuk memastikan manajemen diklat di unit kerjanya tersebut berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan rutinitas dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Dengan demikian, diharapkan IKU ini akan dapat terpenuhi targetnya oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

## 6. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator ini menunjukkan tingkat optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Capaian atas indikator ini diukur dengan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang didasarkan atas empat hal yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi. Namun, khusus untuk Unit Kerja Badan Diklat PKN selaku pengelola DIPA, nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) juga diukur selain nilai EKA. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 113 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2018-2020**

Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2018	2019	2020
Strategi 1	Ditama Revbang	Target	85%	83%	83%
		Realisasi	83,79%	82,90%	84,43%
		Capaian	98,57%	99,88%	101,72%
Strategi 2	AKN I	Target	85%	80%	83%
		Realisasi	37,45%	39,47%	67,21%
		Capaian	44,06%	49,34%	80,98%
	AKN II	Target	85%	80%	83%
		Realisasi	88,66%	75,76%	84,37%
		Capaian	104,31%	94,70%	101,65%
	AKN III	Target	85%	80%	83%
		Realisasi	81,27%	83,59%	87,64%
		Capaian	95,61%	104,49%	105,59%
	AKN IV	Target	85%	80%	83%
		Realisasi	28,47%	39,47%	92,48%
		Capaian	33,49%	49,34%	11,42%
	AKN V	Target	85%	80%	83%
		Realisasi	86,03%	86,43%	85,07%
		Capaian	101,21%	108,04%	102,49%
	AKN VI	Target	85%	80%	83%
		Realisasi	70,88%	65,88%	91,16%
		Capaian	83,39%	82,35%	109,83%
	AKN VII	Target	85%	80%	83%
		Realisasi	49,05%	36,72%	65,03%
		Capaian	57,71%	45,90%	78,34%
AUI	Target	85%	80%	83%	
	Realisasi	85,34%	75,46%	92,79%	
	Capaian	100,40%	94,32%	111,79%	
Strategi 3	Inspektorat Utama	Target	85%	83%	83%
		Realisasi	90,52%	83,18%	86,08%
		Capaian	106,49%	100,22%	103,71%



Strategi dan Unit Pengampu Strategi			Tahun		
			2018	2019	2020
Strategi 4	Badiklat PKN	Target	85%	83%	87%
		Realisasi	81,23%	80,94%	89,69%
		Capaian	95,56%	97,52%	103,09%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	Target	85%	83%	83%
		Realisasi	84,54%	79,43%	84,72%
		Capaian	99,44%	95,69%	102,07%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	Target	85%	83%	83%
		Realisasi	81,24%	73,64%	87,54%
		Capaian	95,58%	88,72%	105,47%

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2020 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam periode Renstra BPK 2020-2024 dari masing-masing strategi sebagai berikut.

**Tabel 114 - Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran terhadap Target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024**

Strategi	Unit Pengampu	Target					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Strategi 1	Ditama Revbang	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	84,43%	98,52%
Strategi 2	AKN I	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	67,21%	80,98%
	AKN II	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	84,37%	101,65%
	AKN III	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	87,64%	105,59%
	AKN IV	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	92,48%	111,42%
	AKN V	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	85,07%	102,49%
	AKN VI	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	91,16%	109,83%
	AUI	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	92,79%	108,27%
Strategi 3	Inspektorat Utama	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	86,08%	100,44%
Strategi 4	Badiklat PKN	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	89,69%	101,12%
Strategi 5	Ditama Binbangkum	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	84,72%	98,86%
Strategi 6	Sekretariat Jenderal	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	87,54%	103,60%

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran yang telah disajikan, realisasi IKU pada seluruh strategi di Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja telah dilakukan secara optimal di seluruh unit kerja. Akan tetapi, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait penganggaran berbasis kinerja ini tetap perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan unit kerja sampai dengan pelaksana. Dengan sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan IKU ini dapat terpenuhi oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

## B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber pendanaan BPK berasal dari APBN yang dikelola melalui dua Program BPK yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Pada Tahun 2020, capaian kinerja BPK didukung dengan pemanfaatan (realisasi) anggaran sebesar Rp3.439.084.663.084,00 atau sebesar 95,54% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3.599.443.771.000.00. Selama Tahun 2020, anggaran BPK mengalami penyesuaian sebagai dampak pandemi Covid-19 dan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Belanja Lain-lain.

Selain itu, menindaklanjuti amanat Pimpinan dalam merespons adaptasi kebiasaan baru selama masa pandemi Covid-19, BPK menjalankan pelaksanaan tugas dari rumah, melakukan realokasi serta penajaman kegiatan dan anggaran Tahun 2020. Hal tersebut berdampak terhadap pencapaian keluaran, realisasi anggaran, dan capaian kinerja Tahun 2020.

Perincian pemanfaatan anggaran BPK ditampilkan pada Tabel 115 berikut.

Tabel 115 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran atas Sasaran Strategis/Strategi yang Didukung

Sasaran Strategis/ Strategi	Nama Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi			3.599.443.771.000	3.439.084.663.084	95,54%
<i>Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan</i>	08	<i>Program Pemeriksaan Keuangan Negara</i>	2.901.230.314.000	2.771.681.112.661	95,53%
	1159	Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara	1.574.366.404.000	1.539.637.111.538	97,79%
Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis	1156	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	11.227.278.000	11.146.360.844	99,28%
	1157	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	3.758.417.000	3.745.500.602	99,66%

Sasaran Strategis/ Strategi	Nama Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	1158	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	4.671.365.000	4.644.342.193	99,42%
Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	1.166.216.360.000	1.093.563.326.584	93,77%
	2039	Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara	18.051.761.000	15.380.122.203	85,20%
Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara	1153	Pengawasan oleh Inspektorat	9.395.758.000	7.256.587.899	77,23%
Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	1167	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	104.293.438.000	87.166.406.761	83,58%
Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	1154	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	4.450.436.000	4.384.586.667	98,52%
	1155	Pelayanan Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum	4.799.097.000	4.756.767.370	99,12%
<b><i>Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi</i></b>	<b><i>01</i></b>	<b><i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK</i></b>	<b><i>698.213.457.000</i></b>	<b><i>667.403.550.423</i></b>	<b><i>95,59%</i></b>
Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan	1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	37.161.872.000	36.693.206.432	98,74%
	1033	Manajemen SDM	321.962.046.000	295.318.180.952	91,72%
	1034	Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Negara	19.350.460.000	19.244.312.219	99,45%

Sasaran Strategis/ Strategi	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	1152 Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	189.624.586.000	189.378.412.261	99,87%
	2045 Pelayanan Kesekretariatan Badan	68.412.847.000	67.851.928.125	99,18%
	2046 Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi	61.701.646.000	58.917.510.434	95,49%

Pendanaan untuk mencapai Sasaran Strategis dan Strategi BPK dimuat dalam dua program penganggaran yaitu Program 01 tentang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK dan Program 08 tentang Program Pemeriksaan Keuangan Negara. Masing-masing program mendukung pelaksanaan kegiatan untuk ketercapaian target kinerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis maupun Strategi. Dukungan kedua program penganggaran tersebut ditampilkan sebagai berikut.



Gambar 13 - Dukungan Program Anggaran dalam Capaian Kinerja

Program Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi dukungan atas pencapaian lima strategi, sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK meliputi dukungan atas pencapaian satu strategi seperti yang tertera pada Gambar 13 di atas. Atas ketidaktercapaian target kinerja, BPK telah berupaya mengakselerasi penyelesaian tahapan-tahapan inisiatif strategi.

## Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi

peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi Keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran.

Pengukuran efisiensi dihitung berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 dengan melakukan pengunggahan data realisasi anggaran dan capaian keluaran BPK Tahun 2020 ke dalam Aplikasi. Alur pengukuran efisiensi tersebut dapat dilihat pada Gambar 14 berikut.



Gambar 14 - Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Tahun 2020

## C. Kinerja dan Capaian Lainnya

Selama Tahun 2020, selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, BPK juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain baik di level nasional maupun internasional, di antaranya sebagai berikut.

### 1. BPK melalui Wakil Ketua BPK Terpilih sebagai *Board Member* INTOSAI Development Initiative (IDI) Periode 2020-2023

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono ditunjuk sebagai *board member* IDI, periode 1 April 2020 - 31 Maret 2023. Proses pemilihannya ditangani oleh komite khusus di IDI yaitu *Nomination and Remuneration Committee* dan berdasarkan proses internal terhadap *personal capacity* dan rekam jejak kandidat di komunitas internasional. Berdasarkan proses tersebut, Wakil Ketua BPK dinilai *capable* dan dapat diandalkan untuk mewakili region Asia dan menyuarakan kebutuhan pengembangan SAI di Asia dengan melihat peran aktif beliau di komunitas SAI di kawasan Asia Pasifik selama ini.

Dengan terpilihnya wakil ketua BPK sebagai *Board Member* IDI, akan memberikan banyak manfaat bagi BPK. Posisi yang strategis ini akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi *best practice* BPK ke komunitas SAI internasional. Selain itu, diharapkan BPK juga dapat mengimplementasikan *best practice* internasional yang sesuai dalam praktik audit di BPK sehingga audit BPK akan sejalan dengan standar audit internasional. Dengan demikian, ke depannya, diharapkan BPK akan menjadi pusat referensi internasional audit bagi SAI lain.

### 2. BPK melalui Wakil Ketua BPK Terpilih sebagai Anggota Independent Audit Advisory Committee (IAAC) PBB

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono telah dipilih sebagai anggota Komite Penasihat Audit Independen (Independent Audit Advisory Committee/IAAC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022. IAAC merupakan badan subsider Sidang Majelis Umum (SMU) PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi SMU PBB Nomor 60/248 yang bertugas dalam kapasitas penasihat ahli (*expert advisory capacity*) dan membantu SMU PBB dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan antara lain dalam mengawasi efektivitas kinerja *The Office of Internal Oversight Services*, manajemen risiko, pelaporan keuangan, operasional, dan peningkatan kerja sama antara badan pengawas dalam organ PBB. Dengan terpilihnya Wakil Ketua BPK sebagai anggota IAAC PBB, Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB. Selain itu, Indonesia juga dapat berperan dalam memastikan kepatuhan manajemen atas hasil pengawasan dan rekomendasi dari *oversight body* lainnya.



### 3. BPK Terpilih Menjadi Ketua ASEANSAI *Task Force on Legal Capacity*

Pada September 2020, BPK mengikuti *Virtual ASEANSAI Executive Committee Meeting* untuk membahas *Term of Reference (TOR)* pendirian *Task Force on ASEANSAI Legal Capacity (TFALC)* yang bertugas untuk mengkaji kebutuhan *legal capacity* pada ASEANSAI. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yaitu pada ASEANSAI *Summit* ke-5 di Kuala Lumpur pada November 2019. *Legal capacity* menjadi isu hangat di Asosiasi BPK se-Asia Tenggara/ASEANSAI (Association of South East Asian Supreme Audit Institution) mengingat terdapat diskusi terkait pentingnya *legal capacity* bagi ASEANSAI ketika akan melakukan kerja sama dengan donor atau pihak lain. Dalam pertemuan itu, BPK mempresentasikan TOR pembentukan *task force* dan memperoleh persetujuan dari *Executive Committee*. Dalam pertemuan tersebut, BPK juga disahkan menjadi Ketua ASEANSAI *Task Force on Legal Capacity*.

### 4. BPK Menerima Penghargaan INTOSAI WGEA atas Visualisasi Hasil Pemeriksaan DAS Citarum serta Menyampaikan Presentasi terkait Rencana *Training on SDGs* dan Pemeriksaan atas Kontribusi Energi Terbarukan pada WGEA *Assembly* ke-20

Salah satu fokus pertemuan WGEA *Assembly* ke-20 adalah pembahasan *Work Package 5*, *Work Package 6*, dan *Work Package 7*. Pada sesi *Work Package 6 on Knowledge Sharing and Capacity Building* yang dipimpin oleh Sekretariat WGEA, BPK bersama dengan SAI India, SAI Estonia, dan SAI Filipina memaparkan perkembangan dari rencana kegiatan yang termasuk dalam Rencana Kerja 2020-2022. BPK memaparkan perkembangan terkait rencana penyelenggaraan *training on SDGs* pada 2021 yang meliputi *Climate Finance*, rencana kurikulum pelatihan, serta rencana untuk melibatkan INTOSAI *Development Initiative (IDI)* dan SAI Amerika Serikat sebagai *Subject Matter Experts (SMEs)*.

Sebagai puncak acara dari Pertemuan WGEA *Assembly* ke-20 adalah pemberian penghargaan pertama INTOSAI WGEA. Penghargaan ini merupakan inisiatif SAI Finlandia selaku Ketua dan Sekretariat WGEA untuk menginspirasi komunitas WGEA untuk terus berinovasi dalam pemeriksaan lingkungan hidup dan juga untuk meningkatkan visibilitas pemeriksaan lingkungan hidup secara global. BPK bersama SAI Slovenia mendapat kehormatan untuk menerima penghargaan pertama INTOSAI WGEA tersebut atas visualisasi hasil pemeriksaan atas DAS Citarum yang diterbitkan pada Tahun 2019.

### 5. BPK Meraih Predikat sebagai Badan Publik Menuju Informatif

BPK meraih predikat sebagai Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian "**Menuju Informatif**" dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada November 2020.



**MENUJU  
INFORMATIF**

**KATEGORI LEMBAGA NEGARA DAN  
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN**

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Bank Indonesia	88.50
2	Komisi Yudisial	86.00
3	Badan Pemeriksa Keuangan RI	82.44
4	Mahkamah Konstitusi RI	82.02
5	Sekretariat Kabinet	80.35

Penganugerahan ini diberikan oleh KIP setiap tahunnya kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan penilaian tersebut, publik dapat melihat badan publik mana yang masuk klasifikasi informatif, menuju informatif, dan badan publik yang diklasifikasikan tidak informatif.

## D. Tantangan Masa Depan

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan karena adanya Pandemi Covid-19, terutama bagi BPK dalam melaksanakan dan mempertahankan kinerjanya. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan kinerja BPK di tengah-tengah situasi Pandemi. Upaya-upaya tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh BPK terutama dengan adanya dinamika organisasi saat ini.

Tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan oleh BPK dalam upaya mempertahankan kinerja dan menjaga keselarasan dengan dinamika organisasi dalam mencapai tujuan organisasi antara lain sebagai berikut.

### 1. Pandemi Covid-19

Merupakan kondisi yang mengharuskan adanya perubahan cara kerja baru (*new normal*) bagi para pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan melakukan sistem kerja dari rumah (*work from home*), *remote Audit*, *e-learning* atau *distance learning*, dan lain sebagainya.

## 2. Transformasi Digital

Adanya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 yang memerlukan respons layanan teknologi informasi (TI) yang tinggi guna mendukung pelaksanaan berbagai proses bisnis. Dalam konteks BPK artinya pemenuhan kebutuhan terhadap layanan TI makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam operasional dari sisi kelembagaan maupun sisi pemeriksaan yang dituntut untuk lebih cekatan (*agile*) dan tangguh (*resilient*) dan selaras dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024.

## 3. Era VUCA

Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar strategi dalam menghadapi era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity* dan *ambiguity*) yang penuh ketidakpastian, adanya *disruptive technology*, serta kondisi normal baru sebagai dampak pandemi Covid-19.





## **PENUTUP**

Laporan Kinerja BPK Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK kepada publik untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh satuan kerja yang telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara lain melalui identifikasi risiko yang menghambat pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang dioperasionalkan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam PK Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen PK Tahun 2020, pencapaian skor kinerja BPK pada periode tersebut secara keseluruhan adalah 98,66 yang berarti naik dari periode Tahun 2019 sebesar 96,02. Pada Tahun 2020, capaian kinerja BPK didukung dengan pemanfaatan (realisasi) anggaran sebesar Rp3.439.084.663.084,00 atau sebesar 95,54% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3.599.443.771.000.00.

Berdasarkan hasil *monitoring* atas pencapaian kinerja Tahun 2020, dari tiga indikator kinerja BPK *Wide*, 47 indikator di masing-masing strategi (Strategi 1 s.d. Strategi 6) yang diukur dan enam indikator kinerja generik, terdapat tiga indikator kinerja yang masih belum dapat dilakukan pengukuran. Ketiga indikator yang belum bisa diukur adalah Tingkat Kematangan Manajemen Perubahan, Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics*, dan Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan.

Belum dapat diukurnya tiga indikator kinerja tersebut mengharuskan BPK untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan intensitas komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan kinerja di ketiga bidang tersebut. Dalam hal pengukuran tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan maka akan ditingkatkan aktivitas terkait pengelolaan manajemen perubahan dalam implementasi Renstra. Khusus pengukuran tingkat pemanfaatan *Big Data Analytics*, akan didorong percepatan pengembangan dan pemanfaatan *Big Data Analytics* sehingga tingkat pemanfaatannya dapat diukur. Untuk Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan maka akan dilakukan penyempurnaan formula untuk mengukur IKU tersebut.

Dalam upaya mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis BPK 2020-2024, BPK memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja saat ini. Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain penyempurnaan aplikasi pengukuran kinerja, meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Kinerja BPK Tahun 2020 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BPK secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.



Kantor Pusat  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 25549990 Ext.3265  
Fax. (021) 5705376  
[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)